



Better
anyumas



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS

2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sepanjang tahun 2024. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan strategis, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai hasil kinerja yang telah dicapai, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Purwokerto, 24 Maret 2025
BUPATI BANYUMAS,

Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO, MM.



PERNYATAAN REVIU



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B PURWOKERTO 53114
Telp. (0281) 630700 Fax. (0281) 643 789 Email:
inspektorat@banyumaskab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwokerto, 11 Maret 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas



Djoko Setyono, S.Sos, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19700222 199001 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan gambaran capaian kinerja yang diukur melalui indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki 4 (empat) tujuan Pembangunan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sudah tercapai dengan capaian indikator kinerja yang menunjukkan tren positif di sebagian besar indikator kinerja. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta Laju Pertumbuhan Ekonomi yang perlu menjadi perhatian bersama pada periode berikutnya.

Dari 4 (empat) tujuan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai target, 2 (dua) indikator kinerja belum berhasil mencapai target, yaitu (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan (2) Laju Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan analisis tingkat capaian tujuan dibandingkan penyerapan anggaran menunjukkan 3 (tiga) tujuan termasuk efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%. Sedangkan 1 (satu) tujuan tidak efisien karena indikator kinerja tidak tercapai 100%.

Berdasarkan analisis penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan, menunjukkan terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 3.919.869.899.786,00 atau 94,58% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.144.715.702.386,00. Dari besaran realisasi anggaran sebesar tersebut diatas terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.145.588.723.914,00 yang berasal dari proses pengadaan barang jasa karena terdapat selisih antara nilai HPS sebesar Rp. 663.142.809.688,00 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 517.554.085.774,00.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan seluruh pihak pada Pemerintah Kabupaten Banyumas semakin memperkuat komitmen untuk mengembangkan budaya kinerja yang berorientasi hasil, serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berdaya saing tinggi.

Demikian ikhtisar eksekutif ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyajikan informasi kinerja yang



transparan serta dapat dijadikan rujukan perbaikan kinerja di masa mendatang menuju ***Banyumas Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari.***



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Reviu	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	2
1. Kondisi Geografis	2
2. Luas Wilayah	3
3. Topografi	3
4. Kondisi Demografi	4
C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4
D. Perangkat Daerah	6
E. Sumber Daya Aparatur	9
F. Sumber Daya Keuangan	10
G. Isu-isu Strategis	11
1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	12
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	12
3. Penanggulangan Kemiskinan	13
4. Penguatan Ketahanan Pangan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
1. Visi	18
2. Misi	19
3. Tujuan dan Sasaran	20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
C. Rencana Anggaran Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Analisis Capaian Kinerja	26
1. Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Efektif dan Berdaya Saing	26
2. Tujuan 2 : Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas SDM	54
3. Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	87
4. Tujuan 4 : Memperkuat Ketahanan Pangan	111
C. Realisasi Anggaran	125
D. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	126
E. Prestasi dan Penghargaan	129
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	132
B. Progres Penyelesaian Isu-isu Strategis	133
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	ASN berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.2.	ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Tabel 1.3.	ASN berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1.4.	Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024	11
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023	24
Tabel 2.2.	Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023	26
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 3.2.	Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	28
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2024	28
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	30
Tabel 3.5.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)	31
Tabel 3.6.	Efisiensi Anggaran Tujuan 1 Tahun 2024	35
Tabel 3.7.	Program Tujuan 1 Tahun 2024	38
Tabel 3.8.	Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	55
Tabel 3.9.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Angka Kemiskinan tahun 2021 s.d 2024	57
Tabel 3.10.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 s.d 2024	59
Tabel 3.11.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeka Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 s.d 2024	60
Tabel 3.12.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	61
Tabel 3.13.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)	63
Tabel 3.14.	Efisiensi Anggaran Tujuan 2 Tahun 2024	79
Tabel 3.15.	Program Tujuan 2 Tahun 2024	83
Tabel 3.16.	Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	87
Tabel 3.17.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 s.d 2024	88
Tabel 3.18.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2021 s.d 2024	90
Tabel 3.19.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	92
Tabel 3.20.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)	93
Tabel 3.21.	Efisiensi Anggaran Tujuan 3 Tahun 2024	99
Tabel 3.22.	Program Tujuan 3 Tahun 2024	105
Tabel 3.23.	Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	111
Tabel 3.24.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2024	112
Tabel 3.25.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	114
Tabel 3.26.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)	115



Tabel 3.27.	Efisiensi Anggaran Tujuan 4 Tahun 2024	121
Tabel 3.28.	Program Tujuan 4 Tahun 2024	123
Tabel 3.29.	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas (Sebelum Audit BPK RI)	125
Tabel 3.30.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas per Tujuan Tahun 2024	126
Tabel 3.31.	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	126
Tabel 3.32.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	127
Tabel 3.33.	Daftar Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	129



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024	29
Grafik 3.2.	Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	31
Grafik 3.3.	Angka Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024	58
Grafik 3.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024	59
Grafik 3.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024	61
Grafik 3.6.	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	64
Grafik 3.7.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	64
Grafik 3.8.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	65
Grafik 3.9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024	89
Grafik 3.10.	Indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023	91
Grafik 3.11.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	94
Grafik 3.12.	Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	94
Grafik 3.13.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2021 s.d 2024	113
Grafik 3.14.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Kabupaten Banyumas	2
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas	7
Gambar 3.1.	Interview penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024	34
Gambar 3.2.	Pelatihan Snack & Bakery di Desa Karangsalam Kec. Kemranjen	68
Gambar 3.3.	Launching Bantuan Rehabilitasi RTLH	69
Gambar 3.4.	Pelatihan Aneka Kue	71
Gambar 3.5.	Penyelenggaraani Job Fair Banyumas 2024	71
Gambar 3.6.	Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah	77
Gambar 3.7.	Peresmian relokasi Puskesmas Pekuncen I, Rehabilitasi Puskesmas Purwokerto Utara II dan Pembangunan Gedung Public Safety Center (PCS) 119 Satria Banyumas	77
Gambar 3.8.	Pelatihan <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS) di RSUD Ajibarang	78
Gambar 3.9.	Pameran Produk Unggulan, Perdagangan, Pariwisata dan Investasi di Batam	98
Gambar 3.10.	Pelatihan Pengasuh Lansia untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	98
Gambar 3.11.	Pelatihan Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	119
Gambar 3.12.	Sosialisasi Rumah Pangan B2SA di Desa Tumiyang	119
Gambar 3.13.	Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	120

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas
- C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- D. Perangkat Daerah
- E. Sumber Daya Aparatur
- F. Sumber Daya Keuangan
- G. Isu-isu Strategis

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tentang SAKIP ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyampaikan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan. Secara administratif, Kabupaten Banyumas berbatasan dengan wilayah kabupaten yang lain yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

2. Luas Wilayah

Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 Ha, dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 Ha.

Dari luas wilayah Kabupaten Banyumas tersebut terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Luas penggunaan lahan pertanian adalah 100.712 Ha dan luas penggunaan lahan pertanian bukan sawah sebesar 32.774 Ha.

3. Topografi

Wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada ketinggian 0-500 mdpl yaitu seluas 121.729,06 Ha. Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : 1) pegunungan di sebelah utara (lereng Gunung Slamet) dan daerah pegunungan Serayu Selatan; 2) dataran rendah di antara lereng Gunung Slamet dan pegunungan Serayu Selatan; dan 3) dataran rendah di sebelah selatan pegunungan Serayu Selatan.

Daerah dataran potensial dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi.

Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi yang kompleks, kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan.

4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir Tahun 2024 sebesar 1.864.665 jiwa yang terdiri dari 940.369 laki-laki dan 924.296 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Cilongok sebanyak 132.412 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 39.378 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.864.665 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah 1.404,55 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Timur yaitu 7543,59 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir yaitu 493,81 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur. Pemusatan penduduk di kawasan perkotaan perlu didukung dengan penyediaan permukiman dengan infrastruktur yang memadai untuk mencegah timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk juga perlu dikendalikan karena keterbatasan daya dukung lingkungan kawasan perkotaan.

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Urusan pemerintahan konkrue dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f) Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) Tenaga Kerja;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan Hidup;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan Informatika;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



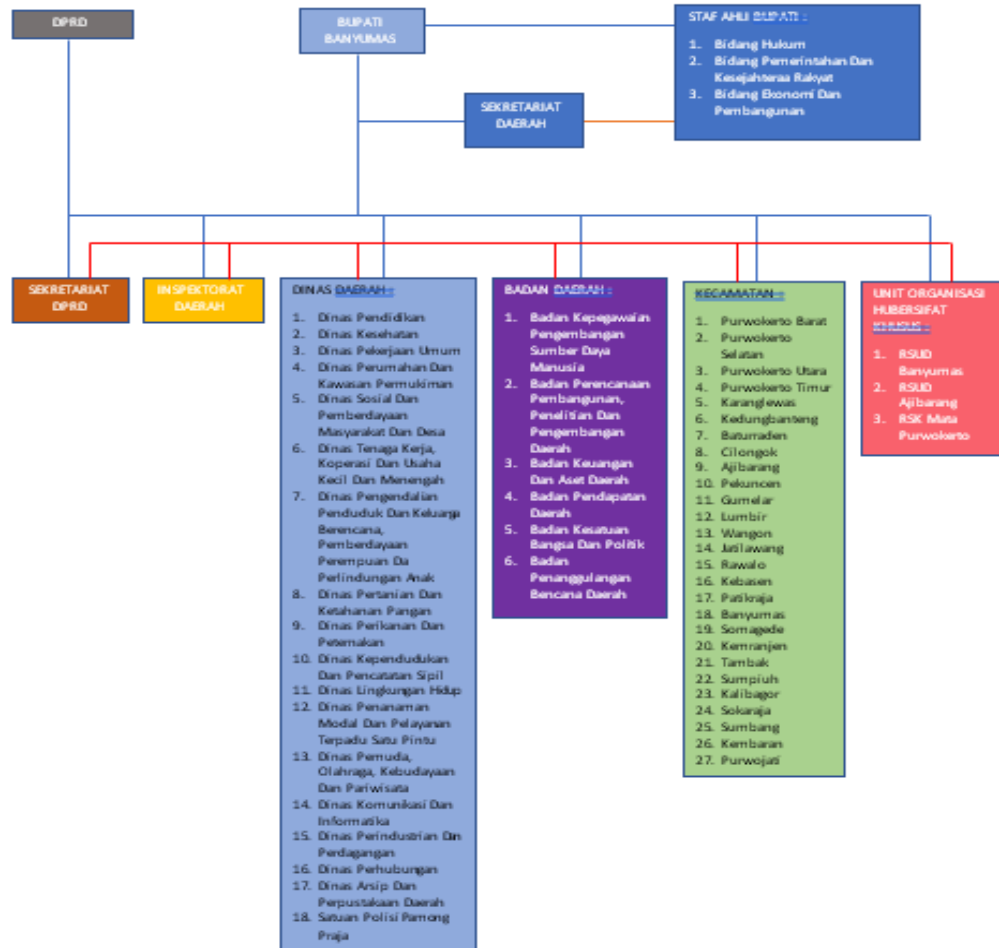
- l) Penanaman Modal;
 - m) Kepemudaan dan Olahraga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan;
 - r) Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- a) Kelautan dan Perikanan;
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian;
 - d) Kehutanan;
 - e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f) Perdagangan;
 - g) Perindustrian;
 - h) Transmigrasi.

D. PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024 berjumlah 54 Perangkat Daerah dan 3 Unit Organisasi Bersifat Khusus, adapun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas



Selain di bentuk Perangkat Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga membentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UOBK dan UPTD Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. UOBK:
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
 - c) Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto.
2. UPTD pada Dinas Kesehatan:
 - a) Puskesmas sebanyak 40;
 - b) Klinik sebanyak 2;
 - c) Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.



3. UPTD pada Dinas Pendidikan:
 - a) SMP Negeri sebanyak 73;
 - b) SD Negeri sebanyak 761;
 - c) TK Negeri sebanyak 6;
 - d) Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 3.
4. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup:
 - a) Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah sebanyak 6;
 - b) Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - c) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
5. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Balai Latihan Kerja.
6. UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan:
 - a) Pusat Kesehatan Hewan;
 - b) Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - c) Pengembangan Budidaya Air Tawar;
 - d) Rumah Potong Hewan.
7. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Balai Benih Pertanian.
8. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja: Unit Pemadam Kebakaran.
9. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Pasar Wilayah sebanyak 4
10. UPTD pada Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata:
 - a) Lokawisata Baturraden;
 - b) Lokawisata Purwomas;
 - c) Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria).
11. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebanyak 1.
12. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum:
 - a) Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah sebanyak 7;
 - b) Laboratorium Konstruksi dan Peralatan.
13. UPTD pada Dinas Perhubungan:
 - a) Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - b) Pengujian Kendaraan Bermotor.

E. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1.

ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	201	17	218	1,55
Golongan II	1178	1728	2906	20,69
Golongan III	1939	3700	5639	40,15
Golongan IV	591	799	1390	9,90
Jumlah PPPK (Non Golongan)	1.125	2.768	3893	27,72
Jumlah	5034	9012	14046	100,00

Sumber: BKPSDM Kab. Banyumas, 2024

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2.

ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	102	10	112	0,80
SLTP UMUM	182	15	197	1,40
SLTP KEJURUAN	5	0	5	0,04
SLTA UMUM	483	153	636	4,53
SLTA KEJURUAN	250	128	378	2,69
DIPLOMA I	3	6	9	0,06
DIPLOMA II	40	24	64	0,46
D - II + A - II	0	0	0	0,00
SARJANA MUDA	0	3	3	0,02
BAKOLOREAT / AKADEMI	9	9	18	0,13
DIPLOMA III	424	1.502	1.926	13,71
D - III + A - III	1	1	2	0,01
DIPLOMA IV	54	175	229	1,63
SARJANA	2.950	6.079	9.029	64,28
S 1 + A IV	126	366	492	3,50
PROFESI	5	6	11	0,08

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
S1 + PROFESI	76	249	325	2,31
PASCA SARJANA	283	269	552	3,93
SPECIALIS I	37	17	54	0,38
SPECIALIS II	1	0	1	0,01
DOKTOR	3	0	3	0,02
Jumlah	5.034	9.012	14.046	100,00

Sumber: BKPSDM Kab. Banyumas, 2024

3. Berdasarkan Jabatan

Jumlah ASN di Kabupaten Banyumas berdasarkan jabatannya per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.

ASN berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Struktural	368	282	650	4,63
Fungsional Tertentu	3347	7842	11190	79,67
Pelaksana	1312	895	2206	15,71
Jumlah			14.046	100,00

Sumber: BKPSDM Kab. Banyumas, 2024

Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka komposisi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bervariasi, yang menunjukkan adanya kesetaraan gender, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan bekerja yang sama.

F. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2024 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI)

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.784.983.840.457,00	3.933.618.417.223,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	966.411.293.457,00	947.208.870.223,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.813.300.407.000,00	2.981.137.407.000,00
1.3	Lain-lain PAD yang sah	5.272.140.000,00	5.272.140.000,00
2.	Belanja Daerah	3.920.027.282.862,00	4.144.715.702.386,00
2.1	Belanja Operasi	2.935.554.214.544,00	3.041.774.010.933,00
2.2	Belanja Modal	384.952.924.438,00	494.655.850.432,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	4.000.105.141,00
2.4	Belanja Transfer	589.520.143.880,00	604.285.735.880,00
3.	Pembiayaan Daerah	135.043.442.405,00	211.097.285.164,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	199.833.458.405,00	275.887.301.164,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	64.790.016.000,00	64.790.016.000,00
	Pembiayaan Netto	135.043.442.405,00	211.097.285.164,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	1,00

Sumber: BKAD Kab. Banyumas, 2024

G. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu

strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024- 2026 sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditunjukkan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang terus mengalami peningkatan. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 yaitu 76,9 kategori BB, pada tahun 2024 meningkat menjadi 85,68 kategori A. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2024 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pencapaian ini harus terus dipertahankan agar terjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Banyumas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditunjukkan dengan nilai SAKIP, dimana nilai Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 adalah 80,53 dan meningkat menjadi 81,79 pada tahun 2024 dengan predikat A. Capaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Kinerja penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan. Indeks SPBE tahun 2023 yaitu 3,39 meningkat menjadi 4,09 pada tahun 2024. Berkaitan dengan keterbukaan dan transparansi informasi publik, pada tahun 2024 Kabupaten Banyumas telah ditetapkan sebagai kabupaten dengan kategori informatif dengan nilai keterbukaan informasi publik sebesar 96,66%.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 ditunjukkan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan nilai 3,58. Capaian ini diharapkan dapat mendorong investasi daerah sehingga dapat membuka lapangan kerja untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Salah satu aspek penilaian IDSD sebagai penguat/enabling adalah penyediaan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kondisi keuangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Penyediaan infrastruktur diupayakan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan memberikan dukungan kegiatan ekonomi. Peningkatan jalan kabupaten, penyediaan air bersih dan air minum, permukiman perkotaan yang berkelanjutan didukung sistem transportasi yang menghubungkan wilayah diharapkan dapat menarik investasi di Kabupaten Banyumas.

Stabilitas keamanan wilayah melalui pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga diperlukan agar menciptakan wilayah yang kondusif bagi investasi. Komitmen bersama serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah perlu terus ditingkatkan, demikian juga pengendalian terhadap potensi konflik politik di masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pembentukan modal dan daya beli masyarakat. Selain juga pertumbuhan ekonomi daerah juga akan dapat membuka peluang pasar bagi investasi.

Untuk mendukung investasi, maka kepastian penggunaan lahan memerlukan rencana tata ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan perijinan. Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten rawan bencana, maka RTRW harus berbasis risiko bencana. di samping itu diperlukan peningkatan mitigasi melalui perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi serta pembangunan infrastruktur yang tanggap risiko bencana.

Keberadaan dan fungsi kelitbangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dimaksudkan sebagai fasilitasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan riset dan inovasi daerah. Pemanfaatan hasil riset dan pengembangan inovasi daerah diharapkan dapat menjadi faktor pendorong daya saing daerah.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Banyumas antara lain disebabkan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia. Meskipun peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Banyumas terus dilakukan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 74,52 menunjukkan peningkatan sebesar 0,56 dari IPM tahun 2023 yaitu 73,96. Kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan

meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023 sebesar 7,87 menjadi 7,91 pada tahun 2024, meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah dari 13,26 tahun pada tahun 2023 menjadi 13,34 tahun pada tahun 2024. Capaian ini masih perlu dioptimalkan karena kurangnya budaya baca masyarakat dan masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Kondisi tersebut memberi gambaran kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas dari aspek pendidikannya.

Komponen kesehatan diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) dimana UHH Kabupaten Banyumas tahun 2023 tercapai sebesar 74,2 meningkat menjadi 74,34 pada tahun 2024. Beberapa layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas belum optimal memenuhi kondisi yang ideal, diantaranya adalah jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio puskesmas per satuan penduduk. Adanya kasus kematian ibu, gizi buruk, dan stunting menjadi perhatian dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Kualitas pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan sehingga generasi baru memiliki peluang kehidupan yang lebih baik.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar 6,35 dan mengalami penurunan menjadi 6,18 pada tahun 2024. Tantangan pengurangan pengangguran adalah dengan meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diupayakan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk, agar mendukung pencapaian bonus demografi pada tahun 2030, dimana penduduk Kabupaten Banyumas didominasi oleh penduduk usia produktif yang dipersiapkan sejak sekarang untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas, serta selanjutnya dapat diserap oleh dunia kerja. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja dan atau memperluas kesempatan berusaha, maka peluang bonus demografi tidak akan dapat dicapai bahkan akan dapat melahirkan kemiskinan baru.

4. Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sebesar 80.74 lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yaitu 79,81. Pemerintah Kabupaten Banyumas menghadapi beberapa tantangan dalam pemenuhan pangan, seperti keamanan pangan yang masih kurang, pola konsumsi yang belum ideal, serta distribusi dan harga pangan yang belum merata. Selain itu, produksi pangan lokal masih terbatas, dan pengelolaan cadangan pangan belum optimal. Faktor geografis juga membatasi kemampuan daerah dalam memenuhi semua kebutuhan pangan secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di wilayahnya.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, sehingga terus berupaya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas. Dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian terus diupayakan untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi faktor penting untuk peningkatan produksi pertanian tanaman pangan sehingga memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan. Sedangkan untuk mendorong keterjangkauan pangan diupayakan melalui keterjangkauan harga pangan. Dengan didukung sistem produksi yang efisien maka harga bahan pangan hasil produksi pertanian pun diharapkan dapat bersaing dan dijangkau masyarakat.

Mendasarkan pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024–2026 dan isu strategis pembangunan, maka Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 diarahkan pada tema Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, dan kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
3. Memperkuat ketahanan pangan untuk mendukung ketahanan ekonomi;



4. Peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
6. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko bencana;
7. Perencanaan penataan kawasan strategis, penyelenggaraan penataan ruang serta pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah untuk persiapan pemekaran;
8. Peningkatan penerapan hasil riset dan inovasi dalam rangka kinerja pelayanan publik;
9. Optimalisasi pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di Masyarakat;
10. Peningkatan ketersediaan pangan secara mandiri, keterjangkauan pangan, harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan, serta optimalisasi pemanfaatan pangan dengan meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C. Rencana Anggaran Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis menggambarkan peran penting dan strategis suatu instansi pemerintah dan menjelaskan alasan keberadaan (eksistensi) instansi tersebut. Dalam perencanaan strategis, diuraikan hasil yang ingin dicapai instansi pemerintah dalam 5 (lima) tahun kedepan serta strategi-strategi penting yang akan dilakukan agar hasil yang direncanakan dapat dicapai sesuai harapan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan daerah. Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penyusunan RPD memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional dan regulasi terkait lainnya.

Visi dan misi Kabupaten Banyumas pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan utama dan 20 (dua puluh) sasaran strategis. Setiap sasaran dilengkapi dengan indikator yang

terukur, memastikan pencapaian yang konkret dan nyata dalam rangka memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Banyumas.

1. VISI

Visi yang tercantum pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 adalah: ***“BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”***.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Sejahtera
(kesejahteraan) | : | suatu kondisi dengan semua kebutuhan hidup minimal secara wajar dapat terpenuhi. Menurut teori Maslow, kebutuhan hidup manusia terdiri atas selain kebutuhan fisik yang berupa: sandang, pangan, papan dan kesehatan, juga kebutuhan psikhis/emosional, seperti: rasa aman, hubungan sosial, penghargaan diri, aktualitas diri, yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. |
| Mandiri | : | semua urusan ditangani sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Yang bersangkutan mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri atau rumah tangganya sendiri, atau mempunyai otonomi. Namun disadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Melalui daya analisisnya masing-masing mengetahui kelebihan dan kekurangan. Karenanya dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah akan berhubungan dengan orang lain untuk saling memberi dan menerima guna menutup kekurangan dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya. |
| Maju dan
berdaya Saing | : | satu ungkapan yang tidak terpisahkan. Secara harafiah maju berarti berwawasan ke depan, sedangkan berdaya saing berarti mempunyai kualitas yang kompetitif. Dengan demikian maju dan berdaya saing adalah suatu kondisi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif. |

1. Sifat pola pikir yang inovatif adalah sifat pola pikir yang dinamis, senantiasa berusaha untuk berkembang baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini.
2. Sifat pola pikir yang prediktif adalah sifat pola pikir yang dapat memperkirakan kondisi (kuantitas dan kualitas) masa depan sebagai arahan atas daya inovasi yang ada/dimiliki. Pengalaman dan informasi kondisi luar merupakan suatu hal yang sangat menunjang dalam memprediksi sesuatu.
3. Sifat pola pikir yang kompetitif adalah sifat pola pikir yang senantiasa berusaha menciptakan kekhasan (spesifikasi dan spesialisasi), keunikan dan keunggulan produk untuk menutup kekurangan/kelemahan produk pihak luar. Untuk ini diperlukan keahlian dalam analisis SWOT.

Sifat pola pikir yang inovatif, prediktif dan kompetitif diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk kegiatan-kegiatan memenuhi kebutuhan hidup.

Lestari

: suatu kondisi yang tidak berubah, bertahan, kekal, seperti keadaan semula. Namun di sisi lain lestari juga mengandung arti suatu dinamika yang tidak pernah berhenti atau dihentikan kecuali Tuhan yang menghendakinya.

2. MISI

Visi RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 dijabarkan melalui 4 (empat) Misi, yaitu:

- a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera
- b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri
- c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing
- d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan Pembangunan tahap keempat pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2026 dan berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan actual yang tengah berlangsung serta menyelaraskan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Tujuan dirumuskan sebagai gambaran kondisi di masa mendatang yang disesuaikan dengan isu-isu dan analisis strategis. Meskipun tujuan tidak selalu harus diukur secara kuantitatif, namun tetap menggambarkan arah pencapaian yang jelas. Sasaran, dalam hal ini, ditetapkan untuk dicapai dalam periode waktu tertentu, memastikan kemajuan yang berkelanjutan sesuai dengan Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Tujuan 1** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing, dengan sasarannya sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan ASN yang profesional.
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - 3) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif.
- b. Tujuan 2** : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah, dengan sasarannya sebagai berikut:
 - 1) Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah.
 - 2) Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah.
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah.
 - 4) Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan Risiko bencana.
 - 5) Meningkatkan kapabilitas riset dan inovasi.
- c. Tujuan 3** : Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasarannya sebagai berikut:
 - 1) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

- 2) Meningkatkan kesempatan kerja.
- 3) Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 5) Meningkatkan derajat Pendidikan.
- 6) Meningkatkan literasi masyarakat.
- 7) Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk.
- 8) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
- 9) Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda.

d. Tujuan 4 : Memperkuat Ketahanan Pangan, dengan sasarannya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri.
- 2) Meningkatkan keterjangkauan pangan.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan pangan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Bupati yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2024 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan Perubahannya Tahun 2024, telah disusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	76,95
2.	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	1.	Angka kemiskinan	%	12% - 11%
		2.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	5,61% - 6,00%
		3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,5
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,35% - 5,40%
		2.	Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks	3,6
4.	Memperkuat ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		Indeks	80,32

Sumber Data : Perjanjian Kinerja, 2024

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 dianggarkan melalui:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2024, yang ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) tahun 2024 ditetapkan dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

NO.	TUJUAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing	974.353.384.826
2.	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	2.454.829.222.966
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	592.628.473.652
4.	Memperkuat ketahanan pangan	122.904.620.942
	JUMLAH	4.144.715.702.386

Sumber Data : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas (diolah), 2024

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
- E. Prestasi dan Penghargaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta pelaporan kinerja ini juga digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Hasil dari pengukuran kinerja ini akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas didasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah ditandatangani. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai tolak ukur keberhasilan program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran instansi.

Pencapaian tujuan dan sasaran diukur berdasarkan indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas. Hasil

pengukuran atas indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan 1						
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,95	85,68	111,34	Tercapai
Tujuan 2						
Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM						
2.	Angka kemiskinan	%	12% - 11%	11.95	100,4	Tercapai
3.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	5,61% - 6,00%	6.18	97,09	Tidak Tercapai
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,5	74,52	100,03	Tercapai
Tujuan 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah						
5.	Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,35% - 5,40%	5,29	98,87	Tidak Tercapai
6.	Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks	3,6	4,01	111,39	Tercapai
Tujuan 4 Memperkuat ketahanan pangan						
7.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,32	80.74	100,52	Tercapai
Rata-Rata Capaian					102,80	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut di atas maka dari 4 (empat) tujuan dengan 7 (tujuh) indikator diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar **102,80%**.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Perbandingan antara target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024.
- 2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya.
- 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
- 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan.
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Efektif dan Berdaya Saing

Kinerja tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing digambarkan dengan membaiknya indeks reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret perlu diwujudkan. Transparansi, akuntabilitas, serta integritas birokrasi terus diperkuat guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan maladministrasi

Efektivitas pemerintahan menjadi faktor utama dalam memastikan kebijakan dan program berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif. Dengan tata kelola yang efisien, setiap sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai hasil terbaik.

Keberhasilan reformasi birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh Kemenpan RB. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan, kualitas SDM aparatur, serta transformasi digital dalam pelayanan publik. Sejak tahun 2023, evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi lebih berfokus pada dampak kinerja dibandingkan aspek administratif.

Terdapat dua fokus utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi:

- a. RB General – untuk memperbaiki manajemen internal instansi pemerintah.
- b. RB Tematik – untuk mempercepat agenda pembangunan nasional, meliputi:
 - 1) Pengentasan kemiskinan
 - 2) Peningkatan investasi
 - 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting
 - 4) Percepatan prioritas aktual presiden, yaitu penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Pada tahun 2024 capaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas (nilai sementara per data 26 Februari 2025 pada Portal RB) adalah sebesar **85,68** berada di **kategori A** dengan **predikat memuaskan** yang mempunyai interpretasi bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan Pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada Pembangunan.

Analisis capaian kinerja tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Efektif dan Berdaya Saing adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,95	85,68	111,34

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing tahun 2024 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3.

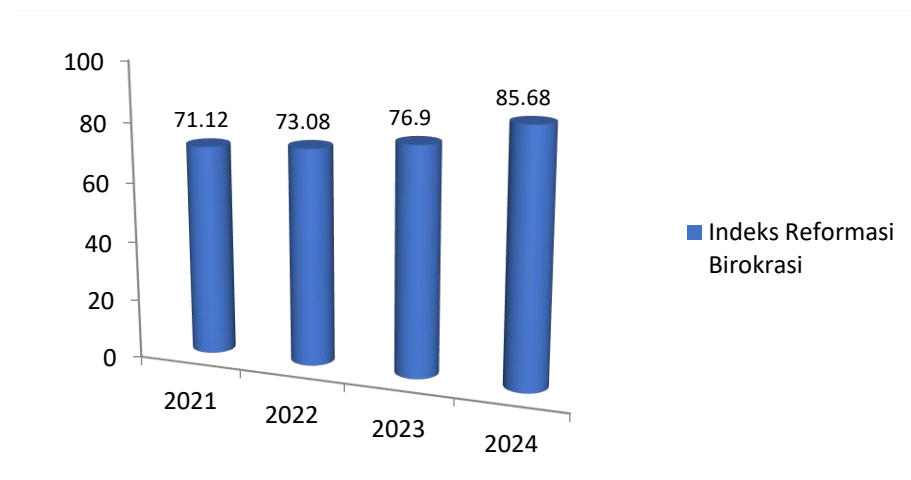
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	71,12	101,6
Tahun 2022				
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	73.08	100,11
Tahun 2023				
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	76,9	102.53
Tahun 2024				
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,95	85,68	111,34

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Grafik 3.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024



Sumber : LHE RB Kementerian PAN dan RB, 2024

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir, dengan realisasi yang konsisten melampaui target. Pada tahun 2021, indeks mencapai 71,12 dari target 70 (101,6%). Tren ini berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 73,08 dari target 73 (100,11%) dan meningkat signifikan pada tahun 2023, mencapai 76,9 dari target 75 (102,53%) dengan rincian nilai RB General sebesar 66,92 dan nilai RB Tematik sebesar 9,98.

Tahun 2024 mencatat pencapaian tertinggi, dengan target 76,95 yang berhasil dilampaui secara signifikan. Realisasi indeks mencapai 85,68 atau setara dengan 111,34%, terdiri dari nilai RB general sebesar 76,63 dan RB tematik 9,05. Kenaikan signifikan pada nilai RB general dari 66,92 di tahun 2023 menjadi 76,63 di tahun 2024 menjadi faktor utama peningkatan indeks Reformasi Birokrasi pada tahun ini. Keberhasilan ini semakin menegaskan komitmen Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel demi pelayanan publik yang lebih baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Efektif dan Berdaya Saing tahun 2024 dengan target akhir pada RPD ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2026 akhir RPD	Persentase Kinerja RPD s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,95	85,68	111,34	75	114,24

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026. Pada tahun 2024, indeks RB ditargetkan sebesar 76,95, dengan realisasi mencapai 85,68 atau setara dengan 111,34% dari target.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 yang sebesar 75, capaian tahun 2024 sudah jauh melampaui target tersebut. Persentase kinerja terhadap target RPD 2026 bahkan telah mencapai 114,24%, Hal ini menandakan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Banyumas mengalami percepatan yang lebih baik dari yang diproyeksikan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5.

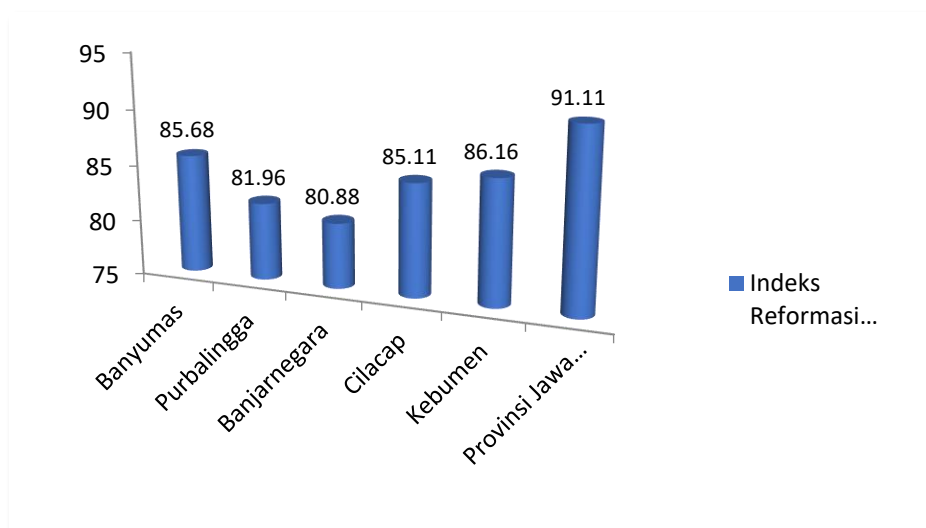
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Reformasi Birokrasi	85,68	70% Kab/Kota yang memiliki Indeks RB “Baik” atau Nilai >60-70	91,11	81,96	80,88	85,11	86,16

Sumber : LHE RB Kementerian PAN dan RB (diolah), 2024

Grafik 3.2

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : LHE RB Kementerian PAN dan RB (diolah), 2024

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebesar 85,68 dengan predikat “A” masih di bawah capaian

Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 91,11 dengan predikat “AA”, namun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah dapat melampaui target Nasional yang mentargetkan Indeks Reformasi Birokrasi Kab/Kota dengan predikat “Baik atau B” dengan nilai >60-70. Apabila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah di wilayah Barlingmascakeb, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas ada di urutan ke-2 dengan nilai tertinggi setelah Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan selisih nilai sebesar 0,48.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan.

Indikator kinerja dari tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Efektif dan Berdaya Saing pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 111,34%.

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Adanya komitmen semua pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi oleh Kemenpan RB;
- 2) Meningkatnya sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah mengingat komponen Indeks RB terdiri dari berbagai indikator yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- 3) Meningkatnya intensitas pendampingan atas pelaksanaan rencana aksi RB secara berkala pada Perangkat Daerah pengampu RB General dan RB Tematik oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas.
- 4) Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas capaian rencana aksi RB secara berkala. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi rencana aksi reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk didalamnya menyampaikan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan *desk evaluation* berdasarkan bukti dukung pelaksanaan RB. Bukti dukung diperlukan sebagai *evidence* yang diminta evaluator saat evaluasi berlangsung.

Hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pencapaian target indeks RB adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana Aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (masih cenderung *business as usual*).
- 2) Belum optimalnya manajemen tata kelola SPBE.
- 3) Belum melaksanakan penilaian mandiri atas kualitas kebijakan yang kemudian hasilnya akan dilakukan evaluasi oleh LAN RI.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- 1) Menyusun Rencana Aksi yang Inovatif dan menjawab permasalahan Pemerintah Kabupaten Banyumas menekankan bahwa rencana aksi reformasi birokrasi tidak boleh sekadar kegiatan rutin (*business as usual*) tetapi harus memiliki pendekatan yang inovatif dan menjawab permasalahan. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar mampu meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan publik serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
- 2) Peningkatan Digitalisasi Layanan
Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi serta meningkatkan integrasi antar sistem dan aplikasi untuk mendukung efisiensi kerja birokrasi. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas meraih Indeks SPBE Tahun 2024 sebesar 4,09, meningkat signifikan dari indeks SPBE Tahun 2023 yang mendapat indeks 3,39.
- 3) Penetapan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
Penetapan Peraturan tersebut dalam rangka menindaklanjuti penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Penyesuaian sistem kerja diimplementasikan dengan tujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi; mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4) Melaksanakan penilaian mandiri atas Kualitas Kebijakan.

Pada tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas belum mengikuti evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Pada evaluasi di tahun pertama ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapat indeks 67,56 dengan predikat baik.

Gambar 3.1

Interview penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
tahun 2024



Sumber: Dinas Kominfo Kab. Banyumas, 2024

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Efektif dan Berdaya Saing, maka selama Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Menetapkan program reformasi birokrasi yang prioritas untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses pengambilan keputusan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya publik.
- 2) Menyederhanakan proses bisnis dalam pelayanan publik.
- 3) Mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan data.

- 4) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- 5) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 6) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Efisiensi Anggaran Tujuan 1 Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	162,762,500	251,762,500	89,000,000
2.	Program Kepegawaian Daerah	1,702,057,600	2,018,223,210	316,165,610
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	259,026,211,581	253,022,813,400	(6,003,398,181)
4.	Program Pendaftaran Penduduk	80,931,400	80,931,400	-
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	45,000,000	45,000,000	-
6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340,506,000	1,133,690,000	793,184,000
7.	Program Pencatatan Sipil	80,000,000	86,485,000	6,485,000
8.	Program Pelayanan Penanaman Modal	225,000,000	212,455,500	(12,544,500)
9.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	895,000,600	1,077,644,107	182,643,507
10.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	31,853,879,600	30,864,594,100	(989,285,500)

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
11.	Program Pengelolaan Arsip	264,192,000	188,077,780	(76,114,220)
12.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	12,860,000	9,550,000	(3,310,000)
13.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	7,948,000	5,197,000	(2,751,000)
14.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	201,000,000	262,890,000	61,890,000
15.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,005,000,000	4,386,917,500	381,917,500
16.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	25,000,000	23,110,000	(1,890,000)
17.	Program Penataan Desa	584,100,003	597,882,803	13,782,800
18.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	587,065,000	787,390,000	200,325,000
19.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1,034,805,500	1,360,907,802	326,102,302
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10,132,698,999	10,126,307,291	(6,391,708)
21.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	215,550,000	191,548,000	(24,002,000)
22.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	302,644,500	276,295,000	(26,349,500)
23.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,790,455,396	1,818,924,116	28,468,720
24.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7,944,017,500	10,132,082,488	2,188,064,988
25.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	680,000,000	422,432,910	(257,567,090)

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
26.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	675,000,000	514,720,200	(160,279,800)
27.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,598,730,000	1,609,985,500	11,255,500
28.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,710,557,000	1,385,896,400	(1,324,660,600)
29.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	18,037,137,885	27,047,537,885	9,010,400,000
30.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	610,653,230,156	619,235,559,056	8,582,328,900
31.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,044,758,600	3,413,594,800	(631,163,800)
32.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	90,000,000	63,671,044	(26,328,956)
33.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	80,000,000	67,645,800	(12,354,200)
34.	Program Aplikasi Informatika	1,410,000,000	1,631,662,234	221,662,234
	Jumlah	961,498,099,820	974,353,384,826	12,855,285,006

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2024

Dari data anggaran tahun 2024, terdapat beberapa program yang mengalami perubahan alokasi dana, baik peningkatan maupun pengurangan yang menunjukkan adanya penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Secara keseluruhan program yang mendukung tujuan 1 (satu) tidak terjadi efisiensi.

Terdapat 16 program yang mengalami efisiensi anggaran. Program dengan pengurangan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang berkurang sebesar Rp 6.003.398.181,00. Pengurangan besar lainnya terjadi pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan penurunan sebesar Rp 1.324.660.600,00 serta Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

DPRD, yang berkurang Rp 989.285.500,00. Pengurangan-pengurangan anggaran ini kemudian dialokasikan kembali kepada program-program prioritas.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tercapainya tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing didukung melalui berbagai macam program sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Program Tujuan 1 Tahun 2024

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
Persentase cakupan penerbitan KTP Elektronik	progres positif	%	99.6	99.32	99.72
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	progres positif	%	99	98.61	99.61
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
Persentase ketersediaan jaringan komunikasi data SIAK berjalan dengan baik	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENATAAN DESA					
Presentase desa mandiri	progres positif	%	14	14	100
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					
Presentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	akumulatif	%	4	4	100
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
Presentase Desa Administrasi Baik	progres positif	%	80	80	100
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase OPD yang menggunakan infrastruktur TIK yang disediakan Pemda	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	progres positif	%	96	100	104.17
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
Persentase sistem elektronik yang diamankan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
Persentase Arsip Tertutup yang Diizinkan untuk Digunakan	progres positif	%	33	100	303.03
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria	progres positif	%	48	48.15	100.31
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	progres positif	%	100	102.46	102.46
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Persentase kerjasama daerah dan pengembangan potensi daerah yang terfasilitasi	progres positif	%	100	100	100
Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EKPPD	progres positif	Nilai	3.51	N/A	N/A
Persentase permasalahan hukum yang terfasilitasi dan tertkoordinasi	progres positif	%	100	177.78	177.78
Persentase Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi	progres positif	%	100	120	120
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengendalian kinerjanya	progres positif	%	100	100	100
Persentase jumlah paket tender pengadaan barang jasa yang berhasil	progres positif	%	100	100	100
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	progres positif	%	100	100	100

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase BUMD yang sehat dan profitable	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
Persentase capaian fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	progres positif	%	90	100	111.11
Persentase capaian fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	progres positif	%	90	100	111.11
Persentase capaian fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	progres positif	%	90	83	92.22
Presentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	progres positif	%	90	100	111.11
Persentase capaian fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	progres positif	%	90	100	111.11
Persentase capaian fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	progres positif	%	90	100	111.11
Presentase capaian fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	progres positif	%	90	100	111.11
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja kategori baik	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Gubernur	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah	progres positif	%	50	89.9	179.8
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
Persentase sub komponen PAD yang realisasi anggarannya melebihi target pendapatan	progres positif	%	56	54	96.43
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Persentase pengelolaan pelayanan kepegawaian	progres positif	%	100	100	100

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	progres positif	%	1.1	4.72	429.09
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan	progres positif	%	55	75.73	137.69
Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD	progres negatif	%	30	0	200
Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	progres negatif	%	1	0	200
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	progres positif	%	94	96	102.13
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
Persentase desa berisiko tinggi	progres negatif	%	10	9.97	200
Level Kapabilitas APIP	progres positif	level	3	3	100
Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B	progres positif	%	50	N/A	N/A
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	88.5	88.75	100.28
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	108.3	108.3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86	96.5	112.21
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	88	86.75	98.58
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86	90.75	105.52
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	84	89	105.95
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86	90	104.65
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	91	98.75	108.52
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	93	97.25	104.57
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	88.5	90	101.69
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	87	93.25	107.18
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	87	87	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86	89.25	103.78
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86	100	116.28
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86.5	79.5	91.91
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86	86	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	91.75	91.75	100

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	88	94.75	107.67
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	88	86	97.73
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	104.17	104.17
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86	86	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	88	90	102.27
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	183.335	183.34
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86	97.25	113.08
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	104.05	104.05
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	85.5	87	101.75
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	88	94	106.82
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	87	88.25	101.44
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	58.47	58.47
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	86	93.75	109.01
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	75	75
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	87.5	87.5
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	97	93.5	96.39
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
Persentase APBDes tepat waktu	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
Indeks Kepuasan Masyarakat	progres positif	Indeks	88.5	93.25	105.37
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	109.74	109.74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	98.8	98.8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	104.532	104.53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	92.82	92.82
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	100	100
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	96.47	96.47
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	95.98	95.98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	150	150
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPd 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPd 2024 s.d. TW IV
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	97.5	97.5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	101.1	101.1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	95.96	95.96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	96.78	96.78

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	104.51	104.51
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	90	100	111.11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	117.09	117.09
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	151.37	151.37
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	98.42	98.42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	108.35	108.35
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100

Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi didukung oleh 34 (tiga puluh empat) program dengan indikator sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) indikator. Dari 213 (dua ratus tiga belas) indikator program pendukung tujuan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing, jumlah indikator yang realisasinya mencapai 100% atau lebih dari 100% sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) indikator.

2. Tujuan 2 : Menangani Kemiskinan dan Pengangguran Serta Meningkatkan Kualitas SDM

Dalam rangka mencapai tujuan menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM, Pemerintah Kabupaten

Banyumas telah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka kemiskinan	%	12% - 11%	11.95	100,4
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	5,61% - 6,00%	6.18	97,09
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,5	74,52	100,03

1) Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut terdiri dari sandang, pangan, pendidikan, papan, dan kesehatan. Seseorang dikatakan miskin jika yang bersangkutan pengeluarannya dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yaitu sebesar Rp. 500 861,00/bln atau Rp.16.695/hari. Pada tahun 2024, target angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan adalah 12% - 11% dengan realisasi sebesar **11.95%.**

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja

adalah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja juga disebut sebagai kelompok usia produktif. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pada tahun 2024, target TPT Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan adalah 5,61% - 6,00% dengan realisasi sebesar **6.18%**.

3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) menetapkan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia yang tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut mencakup:

- a) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
- b) pengetahuan (*knowledge*); dan
- c) standar hidup layak (*decent standard of living*)

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH), Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimensi standar hidup layak diwakili oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Target IPM Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan adalah 74,5 dengan realisasi sebesar **74,52**.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM tahun 2024 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 sebagai berikut :

1) Angka Kemiskinan

Dalam periode 2021 hingga 2024, capaian indikator kinerja angka kemiskinan menunjukkan variasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Angka kemiskinan mengalami penurunan

bertahap, meskipun target belum tercapai hingga tahun 2023. Pada tahun 2021, realisasi angka kemiskinan mencapai 13,66% dengan capaian 90,81% dari target 12,51%. Kemudian pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun menjadi 12,84%, tetapi capaian hanya sedikit meningkat menjadi 91%. Pada 2023, realisasi sebesar 12,53% menunjukkan tren penurunan, namun capaian justru turun menjadi 86,09% karena target lebih ambisius, yaitu 11%. Baru pada tahun 2024, realisasi sebesar 11,95% akhirnya berada dalam rentang target 11% – 12%, sehingga capaian mencapai 100,4%. Penurunan angka kemiskinan yang lebih lambat dari harapan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa hingga 2022, serta dinamika pemulihan ekonomi yang tidak merata. Perubahan dalam cara penilaian pada 2024, dengan target dalam bentuk rentang, memberikan fleksibilitas dalam evaluasi dan lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan. Perbandingan capaian indikator angka kemiskinan tahun 2021 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

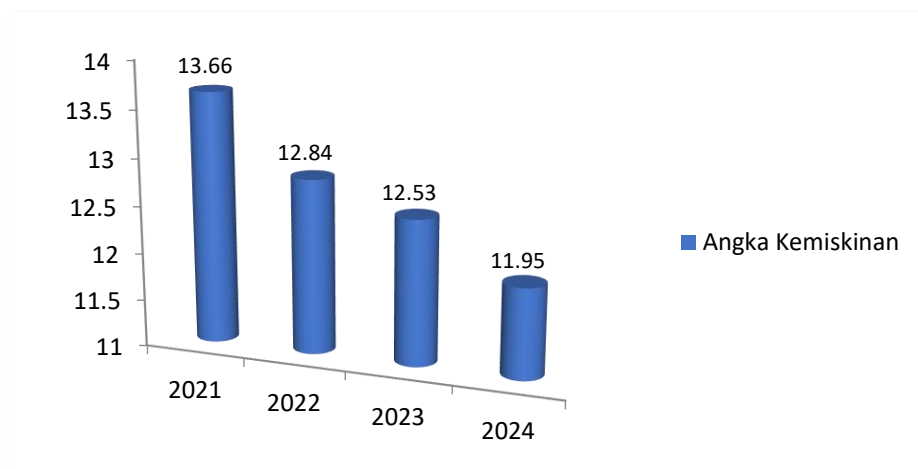
Tabel 3.9.

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Angka Kemiskinan tahun
2021 s.d 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Angka kemiskinan	%	12,51	13,66	90,81
Tahun 2022				
Angka kemiskinan	%	11,76	12,84	91
Tahun 2023				
Angka kemiskinan	%	11	12,53	86,09
Tahun 2024				
Angka kemiskinan	%	12% - 11%	11.95	100,4

Grafik 3.3

Angka Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024

*Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2024*

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren yang agak berbeda dengan angka kemiskinan. TPT menunjukkan kenaikan sejak tahun 2021. Pada tahun 2021, realisasi TPT sebesar 6,05% sedikit lebih tinggi dari target 5,75%, dengan capaian 94,78%. Capaian tahun 2022, masih sama dengan tahun 2021 yaitu 6,05%, dengan target yang ditingkatkan menjadi 5%, sehingga capaian hanya mencapai 79%. Pada tahun 2023, TPT kembali naik menjadi 6,35%, dengan capaian terendah selama periode ini, yaitu 58,89%, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi. Baru pada tahun 2024, TPT turun menjadi 6,18% dan dengan perubahan cara penilaian yang menggunakan rentang target 5,61% – 6,00%, capaian meningkat menjadi 97,09%. Tingginya angka pengangguran ini disebabkan pemulihan sektor ketenagakerjaan setelah pandemi masih belum optimal, dan upaya penciptaan lapangan kerja yang lebih efektif perlu terus dilakukan.



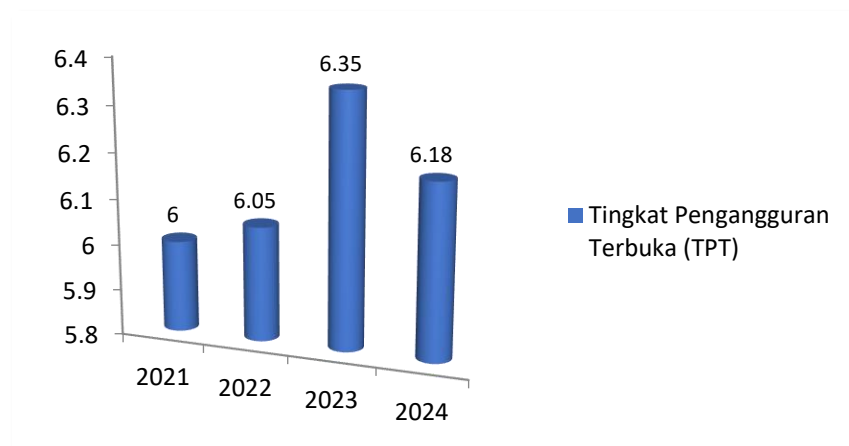
Tabel 3.10.

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) tahun 2021 s.d 2024

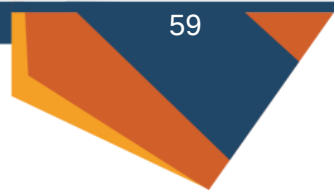
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	5,75	6,0	94,78
Tahun 2022				
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	5%	6,05	79
Tahun 2023				
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	4,5	6,35	58,89
Tahun 2024				
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	5,61% - 6,00%	6.18	97,09

Grafik 3.4

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2024



3) Indeks Pembangunan Manusia

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren yang lebih stabil dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi IPM mencapai 72,59 sedikit melampaui target sebesar 72,18 dengan capaian 100,01%. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 73,30 dan capaian sebesar 101,27%. Pada tahun 2023, IPM kembali mengalami peningkatan menjadi 73,96 dengan capaian 101,9%, dan pada tahun 2024 realisasi mencapai 74,52 dengan capaian 100,03%. Stabilitas dan peningkatan IPM menunjukkan bahwa program pembangunan manusia, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun daya beli masyarakat, berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Tidak ada perubahan signifikan dalam metode penilaian IPM, sehingga pencapaian yang konsisten ini lebih mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan manusia yang telah diterapkan. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 s.d 2024 tersaji pada tabel 3.11.

Tabel 3.11.

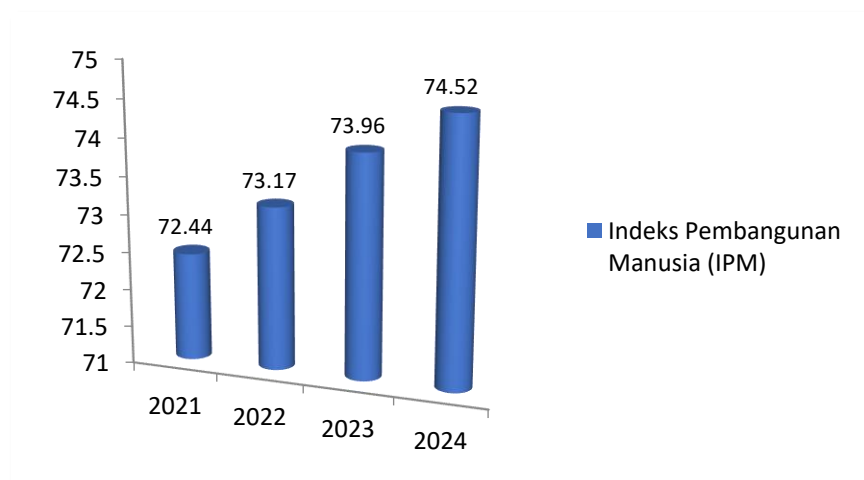
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 s.d 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18	72,59	100,01
Tahun 2022				
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,38	73,30	101,27
Tahun 2023				
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,58	73,96	101,9

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2024				
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,5	74,52	100,03

Grafik 3.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2024

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM tahun 2024 dengan target akhir pada RPD ditampilkan pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12.

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target
Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2026 akhir RPD	Persentase Kinerja RPD s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Angka kemiskinan	%	12% - 11%	11.95	100,4	10,84 - 9,90	90,7
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	5,61% - 6,00%	6.18	97,09	5,51 - 5,90	95,4

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2026 akhir RPD	Persentase Kinerja RPD s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,5	74,52	100,03	76,00	98,05

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan progres yang beragam jika dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka telah mendekati target akhir, sementara Indikator Angka Kemiskinan masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapainya.

Pada indikator **angka kemiskinan**, realisasi tahun 2024 sebesar 11,95% berada dalam rentang target tahunan (11% – 12%) dan mencapai 100,4% dari target tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir RPD yang lebih rendah, pencapaian hingga tahun 2024 baru mencapai 90,7%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan terus menurun, masih ada *gap* sekitar 1% yang harus dicapai dalam sisa periode Rencana Pembangunan Daerah. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu diperkuat untuk memastikan target akhir dapat dicapai.

Untuk **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**, realisasi tahun 2024 sebesar 6,18% sedikit di atas rentang target tahunan (5,61% – 6,00%) dengan capaian kinerja 97,09%. Dibandingkan dengan target akhir RPD di kisaran 5,51% – 5,90%, pencapaian hingga tahun 2024 mencapai 95,4%. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan, angka pengangguran masih relatif tinggi dan memerlukan langkah strategis dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara itu, **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan dua indikator sebelumnya. Realisasi IPM pada 2024 sebesar 74,52, sedikit melampaui target tahunan sebesar 74,5 dengan capaian kinerja sebesar 100,03%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 76,00, pencapaian hingga tahun 2024 sudah mencapai 98,05%. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia dalam

aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan berjalan cukup baik dan sudah mendekati target akhir. Namun, percepatan di sektor pendidikan dan peningkatan daya beli masyarakat masih perlu diperhatikan agar target IPM pada akhir periode RPD dapat tercapai.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator sudah berada di jalur yang relatif baik menuju target akhir Rencana Pembangunan Daerah. Namun, masih ada tantangan dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran, yang memerlukan intervensi kebijakan lebih efektif dalam dua tahun terakhir RPD untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan Kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13.

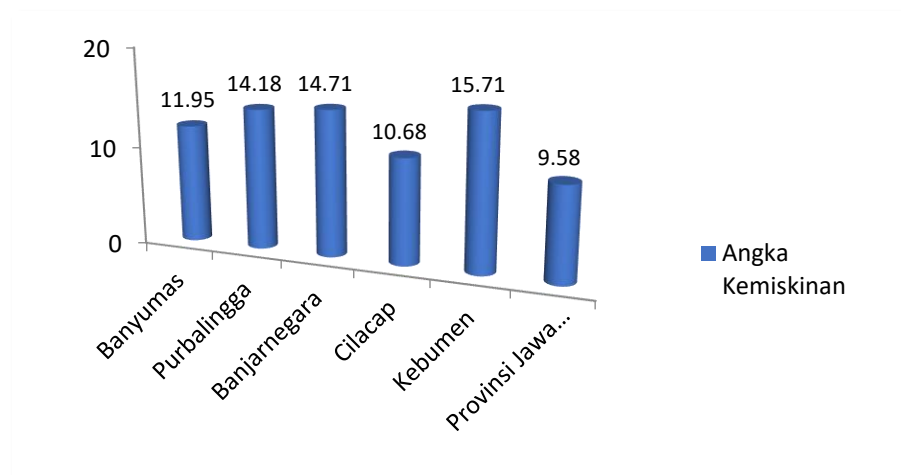
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Angka kemiskinan	11,95	8,57	9,58	14,18	14,71	10,68	15,71
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	6,18	4,91	4,78	4,96	5,57	7,83	5,07
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,52	75,02	73,87	70,97	69,62	72,55	72,48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Grafik 3.6

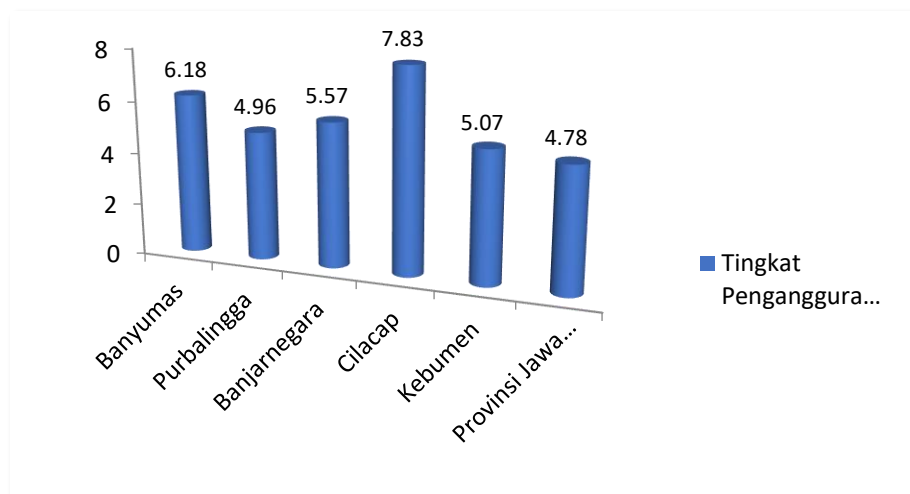
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Grafik 3.7

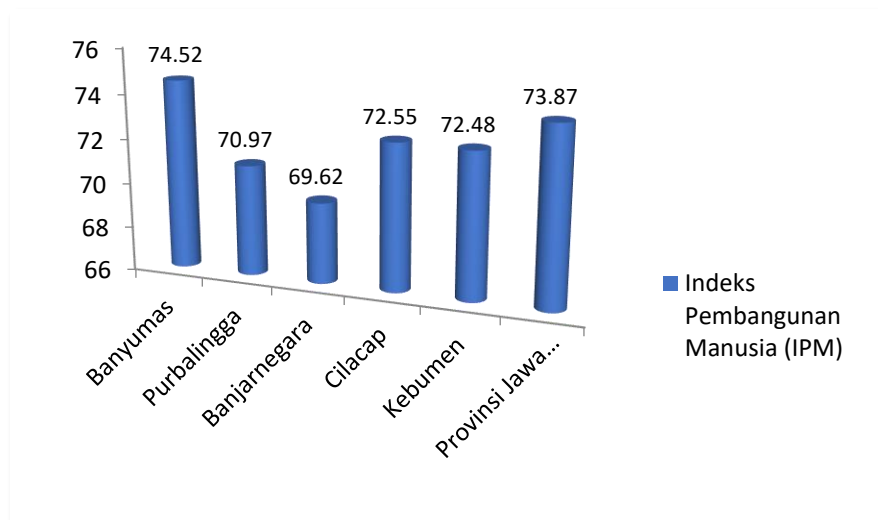
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Grafik 3.8

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jika dibandingkan dengan standar nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar, capaian kinerja Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi di berbagai indikator.

Dalam hal **angka kemiskinan**, Kabupaten Banyumas mencatat realisasi sebesar **11,95%**. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan standar nasional yang berada di angka 8,57% serta Provinsi Jawa Tengah yang memiliki angka 9,58%. Namun, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Banyumas memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Purbalingga (14,18%), Kabupaten Banjarnegara (14,71%), dan Kabupaten Kebumen (15,71%). Meskipun demikian, angka kemiskinan Kabupaten Banyumas masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Cilacap (10,68%).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Banyumas tercatat sebesar 6,18%, yang masih lebih tinggi dibandingkan standar nasional (4,91%) dan Provinsi Jawa Tengah (4,78%). Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, tingkat pengangguran Kabupaten Banyumas lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga (4,96%), Kabupaten Banjarnegara (5,57%), dan Kabupaten Kebumen (5,07%). Namun, Kabupaten Banyumas

masih memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Cilacap yang mencapai 7,83%.

Dari sisi **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, Kabupaten Banyumas mencatat angka 74,52, yang sedikit di bawah standar nasional (75,02%), tetapi lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (73,87%). Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Kabupaten Banyumas memiliki capaian IPM yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Purbalingga (70,97%), Kabupaten Banjarnegara (69,62%), Kabupaten Cilacap (72,55%), dan Kabupaten Kebumen (72,48%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas cukup baik dan berada di atas rata-rata wilayah sekitarnya, meskipun masih sedikit tertinggal dari standar nasional.

Secara keseluruhan, Kabupaten Banyumas memiliki keunggulan dalam Indeks Pembangunan Manusia, yang berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar. Namun, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran masih menjadi tantangan utama karena masih lebih tinggi dibandingkan standar nasional dan provinsi. Untuk mencapai kondisi yang lebih baik, diperlukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memperkuat program pengentasan kemiskinan agar capaian Kabupaten Banyumas bisa sejajar atau melampaui standar nasional dan provinsi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

1) Angka kemiskinan

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- a) Adanya komitmen semua pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan penyusunan strategi kebijakan, yaitu dengan :
 - menyusun peta (*mapping*) program/kegiatan dan anggaran terkait penanggulangan kemiskinan;
 - menetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1011 Tahun 2024 tentang Data Warga Miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

- Pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran, menaikkan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.
 - Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada 60 (enam puluh) desa prioritas kemiskinan ekstreem Kabupaten Banyumas.
 - Pelaksanaan program Aparatur Sipil Negara (ASN) bersedekah, untuk membantu program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- b) Kerja sama dengan berbagai pihak atau stakeholder terkait diantaranya dengan Baznas, Perguruan Tinggi, dan Perbankan untuk mendukung program penanganan kemiskinan;
- c) Realokasi anggaran sehingga anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan semakin optimal baik yang berasal dari sumber pembiayaan APBN, APBD, maupun APBDes serta dari CSR dan Baznas;
- d) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia; dan
- e) Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia.

Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah :

- a) Data kemiskinan yang belum akurat.
- b) Penganggaran belum terpadu diantara perangkat daerah yang menangani program penanggulangan kemiskinan.
- c) Peran sektor swasta dalam penanganan kemiskinan yang masih belum maksimal.
- d) Minimnya Inovasi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan.
- e) Peran Pemerintah Desa dalam penanggulangan kemiskinan masih belum maksimal.
- f) Kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- a) Melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. Data yang akurat dan terkini akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan efektif. Integrasi berbagai sumber data akan dilakukan

- untuk mencakup seluruh kelompok miskin dan rentan di Kabupaten Banyumas.
- b) Perbaikan dan penajaman program penanggulangan kemiskinan serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program dengan mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banyumas.
 - c) Mendorong peran swasta melalui program CSR berbasis pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
 - d) Mendorong terciptanya inovasi guna mendukung penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyumas dengan pemberian bantuan untuk inovasi kemiskinan di 3 (tiga) desa yaitu Desa Tipar Kidul, Desa Kracak dan Desa Jipang.
 - e) Penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan usaha mikro, dan fasilitasi akses lapangan kerja.
 - f) Menggerakkan karang taruna, komunitas sosial, dan organisasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat miskin.
 - g) Pengembangan inovasi sosial dan ekonomi berupa pengolahan dan pemanfaatan sampah, budidaya tanaman sayur, pelatihan pekarangan pangan lestari dan budidaya ternak.

Gambar 3.2

Pelatihan Snack & Bakery di Desa Karangsalam Kec. Kemranjen



Sumber: Bappedalitbang, 2024

Gambar 3.3
Launching Bantuan Rehabilitasi RTLH



Sumber: Bappedalitbang, 2024

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sebesar 6,18%, capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target adalah:

- Kesenjangan Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar Kerja**
Banyak tenaga kerja di Kabupaten Banyumas memiliki keterampilan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan pasar kerja saat ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan kejuruan yang relevan, sehingga menghasilkan *mismatch* antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri.
- Keterbatasan Investasi dan Infrastruktur**
Investasi di sektor produktif dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi masih belum optimal. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai menghambat masuknya investasi baru dan pengembangan usaha lokal yang berpotensi menyerap lebih banyak tenaga kerja.
- Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk**
Jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi terus bertambah setiap tahun, tetapi tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Banyak angkatan kerja baru yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian mereka.

- d) **Potensi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang Belum Optimal**
Meskipun Kabupaten Banyumas memiliki potensi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, namun belum ada strategi yang terintegrasi untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut secara maksimal. Padahal, sektor ini jika dikelola dengan baik bisa menjadi sumber lapangan kerja baru.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- a) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan dan penyediaan SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha;
- b) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi sebanyak 13 (tiga belas) paket pelatihan berbasis kompetensi di antaranya pelatihan: Barista, Pangkas Rambut/Barber, Pembuatan Aneka Kue dan Roti, Pengasuh Lansia (untuk Calon Pekerja Migran Indonesia), Menjahit, Las, Otomotif dan Servis Handphone.
- c) Pelaksanaan pelatihan berbasis kemasyarakatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Tata Rias Wajah (MUA) di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen dan Pelatihan Tata Boga/Kuliner Kreatif dengan sasaran masyarakat Desa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, dan dilaksanakan di 5 Desa diantaranya:
- Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen;
 - Desa Bantarwuni, Kecamatan Kembaran;
 - Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen;
 - Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang;
 - Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas;
 - Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang
- d) Fasilitasi sertifikasi juru sembelih halal;
- e) Mengadakan Job Fair Tahun 2024 sebagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan mempercepat penyerapan tenaga kerja. Acara ini diikuti oleh 69 (enam puluh sembilan) perusahaan dari berbagai sektor dan menarik minat 5.062 pengunjung terdaftar, baik secara online maupun offline. Dari pelaksanaan job fair ini jumlah peserta yang diterima bekerja di perusahaan peserta Job Fair sebanyak 946 orang;
- f) Peningkatan program kerjasama dengan dunia usaha;

- g) Mendorong terlaksananya Job Fair di Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan SMK dan Perguruan Tinggi;
- h) Sosialisasi ketenagakerjaan dilaksanakan secara berkala;
- i) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- j) Melakukan *Job canvassing* dan *job matching*

Gambar 3.4

Pelatihan Aneka Kue



Sumber: Dinnakerkop UKM, 2024

Gambar 3.5

Penyelenggaraani Job Fair Banyumas 2024



Sumber: Dinnakerkop UKM, 2024

3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sebesar 74,52. Capaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah:

- a) Komitmen semua pihak pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam peningkatan IPM yang meliputi 3 (tiga) komponen yaitu komponen kesehatan yang diukur dengan umur harapan hidup, komponen pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli;
- b) Kerja sama dengan berbagai pihak atau stakeholder terkait baik itu swasta, baznas, perguruan tinggi maupun perbankan untuk mendukung program peningkatan IPM ;
- c) Rehabilitasi dan melengkapi fasilitas sekolah, membangun sekolah baru, menjamin aksesibilitas lokasi sekolah berupa jalan atau jembatan, serta moda transportasi dan bus sekolah gratis;
- d) Pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS);
- e) Pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu hingga ke desa sehingga meningkatkan cakupan layanan kesehatan dasar;
- f) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dalam rangka mendukung peningkatan IPM; dan
- g) Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM.

Hambatan dalam pencapaian target adalah :

- a) Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan.

Jumlah dokter umum di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 tercatat 642 orang, dengan rasio 0,76 dokter per satuan penduduk. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, idealnya satu dokter melayani 2.200 penduduk. Namun kenyataannya satu dokter di Kabupaten Banyumas harus melayani 2.895 penduduk. Meskipun jumlah dokter meningkat

dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 606 orang, rasio ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk tahun 2024, yaitu 1,2 dokter per satuan penduduk.

b) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas kesehatan maternal. Pada tahun 2024, AKI di Kabupaten Banyumas tercatat sebesar 97,77 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang berada di angka 91,93 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tergolong tinggi dan menempatkan Kabupaten Banyumas sebagai daerah dengan kasus kematian ibu tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kendal.

c) Tingkat Kemiskinan yang masih relatif tinggi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas, angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sebesar 11,95%, mengalami penurunan dari 12,53% pada tahun 2023. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 10,47%. Tingginya angka kemiskinan berkontribusi pada keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan informasi kesehatan, serta sulitnya mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan pengobatan.

d) Keterbatasan tenaga pendidik

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, idealnya seorang guru pada jenjang SD, SMP dan SMA bertanggungjawab atas 20 orang murid. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang PAUD di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 adalah 1:15, sementara untuk jenjang SD adalah 1:18, untuk jenjang SMP adalah 1:29 dan untuk pendidikan non formal/kesetaraan sejumlah 1:24.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

a) **Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan**

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, RSUD Banyumas telah mengadakan Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life

Support (BTCLS) pada 7 Oktober 2024 yang diikuti oleh 25 tenaga kesehatan, termasuk dari Puskesmas Kalibagor. Pelatihan serupa juga dilakukan di RSUD Ajibarang pada 23 September 2024 sebagai bentuk kerja sama antar fasilitas kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis. Selain itu, pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim bagi dokter dan bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi tenaga kesehatan juga telah diadakan dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.

Peningkatan jumlah dokter spesialis dari 353 orang pada tahun 2023 menjadi 396 orang pada tahun 2024 mencerminkan tidak hanya ketersediaan tenaga medis untuk pelayanan kesehatan yang lebih spesifik, tetapi juga peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan peningkatan keahlian guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.

b) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan telah memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas kesehatan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan puskesmas diantaranya Puskesmas Pekuncen I, Puskesmas Kembaran I, Puskesmas Purwokerto Utara II, dan Puskesmas Purwokerto Selatan. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sanggreman dan Jingkang, serta Rehabilitasi Puskesmas Jatilawang. Selain itu, pengadaan tanah dilakukan untuk Puskesmas Tambak II, Puskesmas Lumbir II, Puskesmas Tambak I dan Puskesmas Kemranjen II.

c) Pelaksanaan program sosial khususnya kesehatan lingkungan

Program sosial terutama dalam bidang kesehatan lingkungan, bertujuan untuk menyediakan sarana sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat, seperti program rumah sehat, pembangunan jamban yang higienis (jamban sehat), dan penyediaan akses air bersih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat dan

mencegah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sanitasi yang layak.

d) Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan terus berupaya menjamin akses layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang didanai dari APBN maupun APBD. Pada tahun 2024, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 946.744 jiwa, mengalami penurunan dari tahun 2023 yang berjumlah 962.077 jiwa. Sebaliknya, jumlah PBI APBD meningkat dari 79.676 jiwa pada tahun 2023 menjadi 189.399 jiwa pada tahun 2024. Secara keseluruhan, jumlah penerima manfaat dari PBI APBN dan APBD pada tahun 2024 mencapai 1.136.143 jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.041.753 jiwa. Upaya ini juga didukung oleh Instruksi Bupati Banyumas Nomor 440/7804 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Banyumas.

e) Penanganan Angka Kematian Ibu (AKI)

Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), telah dilaksanakan berbagai program, termasuk pertemuan Pokja Penyelamat Ibu dan Bayi yang dikemas dalam kegiatan “Coffee Morning”. Selain itu, dilakukan pembentukan jejaring skrining layak hamil, *Antenatal Care* (ANC), dan stunting serta orientasi Forum Masyarakat Madani (FMM) bagi petugas promosi kesehatan. Pendampingan tenaga ahli spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG) serta spesialis anak (Sp.A) di puskesmas juga terus dilakukan. Guna memastikan layanan kesehatan ibu dan anak berjalan optimal, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), supervisi layanan kesehatan ibu, anak, dan gizi di posyandu, serta pertemuan pembelajaran massal berbasis rekomendasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) terhadap kasus kematian ibu dan bayi.

f) Pembentukan Tim di Tingkat Kabupaten untuk Program Penanganan Anak Tidak Sekolah Gerakan Sekolah Maneh (ATS-GSM)

Tim ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk menangani permasalahan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyumas. . Tim akan terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Baznas, serta organisasi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

g) Mendorong agar anak tidak sekolah (ATS) dapat melanjutkan pendidikan kembali baik melalui SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) maupun PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Anak-anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal diberikan alternatif untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal seperti SKB dan PKBM. SKB dan PKBM menyediakan program kejar paket A (setara SD), paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA). Program ini dirancang agar fleksibel sehingga anak-anak yang bekerja atau memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat belajar sesuai dengan kondisi mereka.

h) Pemberian Beasiswa Anak Tidak Sekolah.

Beasiswa diberikan untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki akses ke pendidikan tanpa terkendala biaya. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat yang ditujukan bagi siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Sementara itu, Kartu Banyumas Pintar (KBP) merupakan inisiatif daerah untuk melengkapi bantuan pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Banyumas. Selain itu, Baznas Kabupaten Banyumas juga dilibatkan untuk memberikan bantuan pendidikan, baik dalam bentuk beasiswa maupun fasilitas pendidikan lainnya, guna membantu ATS kembali bersekolah.

i) Penambahan tenaga guru

Dalam rangka memenuhi rasio guru terhadap murid, maka pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pengadaan tenaga guru sejumlah 450 orang.

Gambar 3.6

Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2024

Gambar 3.7.

Peresmian relokasi Puskesmas Pekuncen I, Rehabilitasi Puskesmas Purwokerto Utara II dan Pembangunan Gedung Public Safety Center (PCS) 119 Satria Banyumas



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2024

Gambar 3.8.

Pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS) di RSUD
Ajibarang



Sumber: RSUD Ajibarang, 2024

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2024 Pemerintah Kabupten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Pengembangan sentra produk unggulan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada penguatan factor pemasaran dalam negeri maupun pemasaran luar negeri (ekspor) serta inovasi dalam diversifikasi produk dan inovasi daya tarik produk.
2. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
3. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
4. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja

5. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Efisiensi Anggaran Tujuan 2 Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-
2	Program Hubungan Industrial	96,243,160	66,609,656	(29,633,504)
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	745,000,000	950,429,900	205,429,900
4	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	8,500,000	7,500,000	(1,000,000)
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20,000,000	867,299	(19,132,701)
6	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	8,544,300,000	8,544,300,000	-
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,782,524,000	3,788,312,000	5,788,000
8	Program Pemberdayaan Sosial	869,668,000	854,660,800	(15,007,200)
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	12,722,264,000	12,722,264,000	-

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
10	Program Pembinaan Perpustakaan	306,500,000	257,225,800	(49,274,200)
11	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	206,000,000	206,000,000	-
12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	213,957,931,355	231,394,292,126	17,436,360,771
13	Program Penanganan Bencana	277,586,000	227,500,000	(50,086,000)
14	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	29,913,927,500	28,205,422,500	(1,708,505,000)
15	Program Penempatan Tenaga Kerja	670,000,000	524,235,100	(145,764,900)
16	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	452,000,000	688,425,000	236,425,000
17	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	20,000,000	5,414,800	(14,585,200)
18	Program Pengelolaan Pendidikan	304,706,504,500	311,087,396,500	6,380,892,000
19	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	5,000,000	5,000,000	-
20	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	25,000,000	76,105,000	51,105,000
21	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	215,000,000	208,050,000	(6,950,000)

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
22	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3,366,281,000	14,758,351,000	11,392,070,000
23	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	235,000,000	320,992,900	85,992,900
24	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1,000,000,000	2,125,000,000	1,125,000,000
25	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	783,767,000	783,767,000	-
26	Program Pengendalian Penduduk	1,305,682,400	1,284,182,400	(21,500,000)
27	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,392,822,000	2,446,773,700	53,951,700
28	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	35,000,000	35,000,000	-
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,745,685,783,450	1,825,950,116,503	80,264,333,053
30	Program Perencanaan Tenaga Kerja	130,000,360	25,567,744	(104,432,616)
31	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5,773,396,000	5,696,691,460	(76,704,540)
32	Program Perlindungan Khusus Anak	260,520,000	260,520,000	-
33	Program Perlindungan Perempuan	198,480,000	196,480,000	(2,000,000)
34	Program Promosi	200,000,000	137,603,000	(62,397,000)

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
	Penanaman Modal			
35	Program Rehabilitasi Sosial	668,955,778	459,535,778	(209,420,000)
36	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	528,631,000	528,631,000	-
	Jumlah	2,340,108,267,503	2,454,829,222,966	114,720,955,463

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2024

Dari data anggaran tahun 2024 diatas, terdapat beberapa program yang mengalami perubahan alokasi dana, baik peningkatan maupun pengurangan yang menunjukkan adanya penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Secara keseluruhan program yang mendukung tujuan 2 (dua) tidak terjadi efisiensi.

Terdapat 16 program yang mengalami efisiensi anggaran. Program dengan pengurangan anggaran terbesar adalah Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, yang berkurang sebesar Rp 1.708.505.000,00. Pengurangan besar lainnya terjadi pada Program Rehabilitasi Sosial, dengan penurunan sebesar Rp 1209.420.000,00 serta Program Penempatan Tenaga Kerja, yang berkurang Rp 145.764.900,00. Pengurangan-pengurangan anggaran ini kemudian dialokasikan kembali kepada program-program prioritas.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tercapainya tujuan Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM didukung melalui program-program berikut :

Tabel 3.15.
Program Tujuan 2 Tahun 2024

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Tw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
APS 7-18 Tahun Kesetaraan	progres positif	%	100	25.47	25.47
APS 5-6 Tahun	progres positif	%	100	80.1	80.1
APS 7-15 Tahun	progres positif	%	100	99.85	99.85
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	progres positif	%	90	56	62.22
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Persentase Fasyankes UKM dan UKP yang sesuai standar	progres positif	%	87	100	114.94
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Angka Kematian Ibu	progres negatif	/ 100.000 Kelahiran Hidup	90	97.77	56.14
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
ratio dokter per satuan penduduk	progres positif	Rasio	0.8	0.76	95
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
% sarana farmasi alkes makmin yang memenuhi syarat	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
Persentase Kemandirian Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	progres positif	%	87	100	114.94
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Jumlah Fasyankes sesuai standar	progres positif	Unit Kerja	1	1	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
Presentase PSKS yang aktif	progres positif	%	58	57	98.28
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
Presentase makam pahlawan yang dikelola	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Tw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
Persentase lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	progres positif	%	10.45	10.039	96.07
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
Presentase lowongan kerja yang terpenuhi	progres positif	%	90	90.14	100.16
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
Persentase perencanaan tenaga kerja yang tersedia	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	progres positif	%	100	100	100
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	progres positif	%	22	22	100
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	progres positif	%	41.37	41.37	100
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	progres positif	%	0.03	0.016	53.33
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Tw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi	progres positif	%	85	85	100
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
Angka Kelahiran Total atau TFR	progres negatif	Angka	2	1.69	115.5
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI	progres positif	%	73	71.22	97.56
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	progres positif	%	81	84.21	103.96
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	progres positif	%	85	85	100
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	progres positif	%	43.5	46.09	105.95
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	progres positif	%	50	0	0
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat Lol	progres positif	%	50	200	400
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
Persentase realisasi investasi	progres positif	%	95	211.8	222.95
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	progres positif	%	0.41	0.31	75.61
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten	progres positif	%	1.72	4.9	284.88

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Tw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
Presentase peningkatan prestasi olahraga pemuda	progres positif	%	7.62	3.18	41.73
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
Persentase Peningkatan Wirausaha Muda	progres positif	%	17.5	111.42	636.69
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	progres positif	Rasio	0.56	0.59	105.36
Rata rata Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	progres positif	Orang	1000	1639	163.9
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
Persentase Naskah Kuno Milik Masyarakat yang Dialih Mediakan	progres positif	%	60	60	100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
Persentase Calon Transmigran Yang Akan Ditempatkan	progres positif	%	10	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	109.85	109.85
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	96	100	104.17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	80	140.24	175.3

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2024

Tercapainya tujuan Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM dengan indikator Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didukung oleh 36 (tiga puluh enam) program dengan indikator sejumlah 50 (lima puluh) indikator. Dari 50 (lima puluh) indikator pada 36 (tiga puluh enam) program pendukung tujuan Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM, indikator yang realisasi sama dengan atau lebih dari 100% sebanyak 36 (tiga puluh enam) indikator.

3. Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks daya saing daerah (IDSD)

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,35% - 5,40%	5,29	98,87
Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks	3,6	4,01	111,39

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Banyumas mencapai **5,29%**, dari target 5,35% - 5,40%, sehingga masih belum mencapai target.

2) Indeks daya saing daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terdiri dari 12 (dua belas pilar dan 48 (empat puluh delapan) indikator. Tujuan IDSD adalah untuk mengukur pencapaian aktivitas di daerah yang dapat menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan mandiri. Pada tahun 2024 capaian IDSD Kabupaten Banyumas mencapai **4,01** dari target 3,6 dari skala 5.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah tahun 2024 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.16 dan 3.17 sebagai berikut :

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.17.

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 s.d 2024

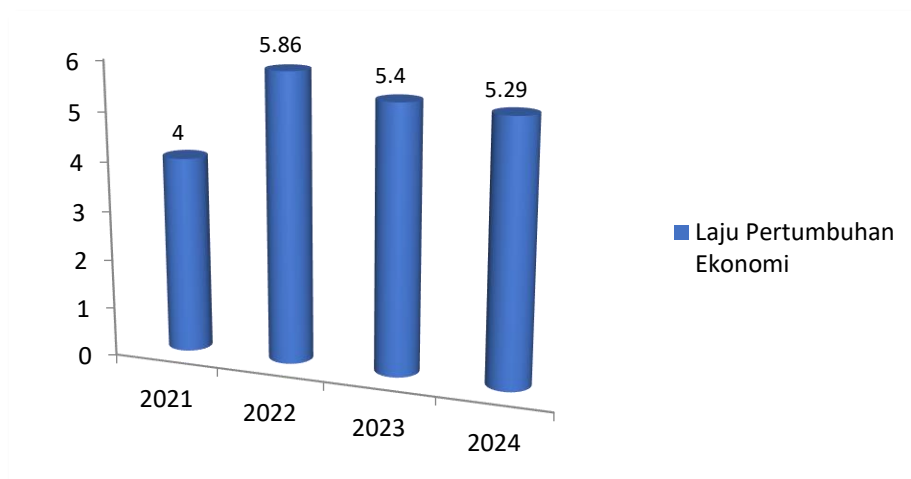
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,1	4	97,56
Tahun 2022				
Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,5	5,86	130,22
Tahun 2023				
Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,0	5,40	108
Tahun 2024				

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,35% - 5,40%	5,29	98,87

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2024

Grafik 3. 9

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2024

Realisasi dan capaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, meskipun terdapat fluktuasi dalam pencapaiannya. Pada tahun 2021, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 4,1%, sementara realisasi yang berhasil dicapai adalah 4,0%. Dengan capaian sebesar 97,56%, hampir seluruh target dapat direalisasikan meskipun masih sedikit di bawah ekspektasi. Hal ini dapat disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, di mana aktivitas ekonomi baru mulai pulih secara bertahap.

Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam pencapaian kinerja. Target awal sebesar 4,5% justru terlampaui dengan realisasi mencapai 5,86%, menghasilkan capaian sebesar 130,22%. Angka ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Peningkatan investasi, pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, serta kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan pemerintah kemungkinan menjadi faktor utama yang mendorong pencapaian yang jauh melampaui target.

Tren pertumbuhan berlanjut pada tahun 2023, dengan target sebesar 5,0% dan realisasi yang mencapai 5,40%. Capaian sebesar 108% ini menandakan bahwa kondisi ekonomi semakin stabil dan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kestabilan daya beli masyarakat, peningkatan konsumsi domestik, serta keberlanjutan program pembangunan dan investasi di sektor-sektor strategis turut berperan dalam keberhasilan ini.

Namun, pada tahun 2024, metode penetapan target mengalami sedikit perubahan. Jika sebelumnya target ditetapkan dalam bentuk angka tunggal, pada tahun ini target diberikan dalam bentuk rentang, yaitu 5,35% - 5,40%. Realisasi yang dicapai adalah 5,29%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 98,87%. Meskipun realisasi ini hampir mencapai target, angka tersebut masih berada sedikit di bawah batas bawah rentang yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Kinerja ekonomi mengalami peningkatan yang cukup baik, terutama pada tahun 2022 dan 2023 yang berhasil melampaui target. Namun, capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa masih ada faktor yang perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berada dalam jalur yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Tabel 3.18

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2021 s.d 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks	N/A	3,543	N/A
Tahun 2022				
Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks	N/A	3,43	N/A
Tahun 2023				

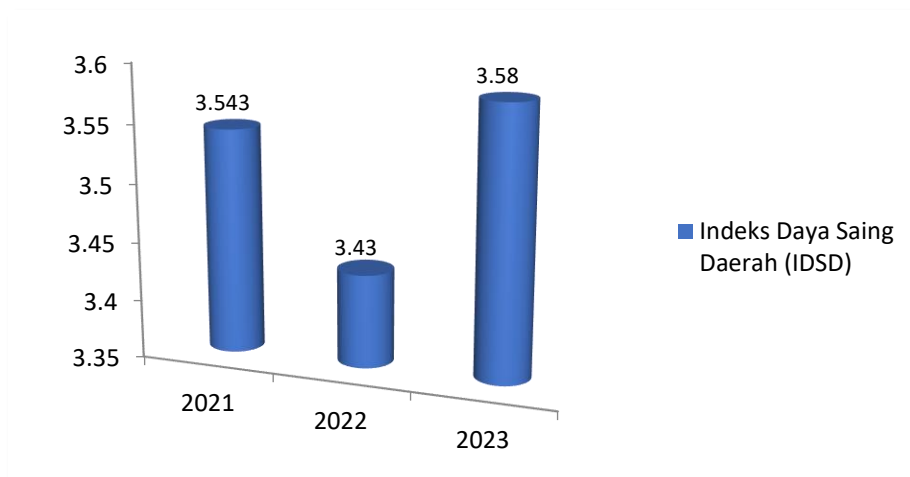


Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks	N/A	3,58	N/A
Tahun 2024				
Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks	3,6	4,01	111,39

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

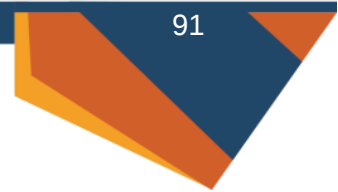
Grafik 3. 10

Indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Banyumas
Tahun 2021-2023



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

Berdasarkan tabel 3.18 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki skor IDSD yang berfluktuasi dari tahun-ke tahun. Pada tiga tahun terakhir, nilai tertinggi ada pada tahun 2024 dengan nilai 4,01. Sedangkan nilai terendah ada pada tahun 2022 dengan nilai 3,43. Pengukuran IDSD tahun 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. IDSD tahun 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran global competitiveness index (GCI) tahun 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD tahun 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD tahun 2022



terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Pengukuran IDSD tahun 2024 mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran agar relevan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Pada IDSD 2024 ini dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator dan cara penghitungan skor sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level industri dan perspektif makro di level institusi publik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah tahun 2024 dengan target akhir pada RPD ditampilkan pada tabel 3.19 sebagai berikut :

Tabel 3.19.

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2026 akhir RPD	Persentase Kinerja RPD s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,35% - 5,40%	5,29	98,87	6,10 - 6,50	86,72
Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks	3,6	4,01	111,39	3,7	108,38

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan berada dalam rentang 5,35% hingga 5,40%, sementara realisasi yang tercapai adalah 5,29%. Dengan capaian sebesar 98,87% dari target yang telah ditetapkan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang stabil meskipun sedikit di bawah ekspektasi. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir RPD pada tahun 2026 yang ditetapkan dalam kisaran 6,10% hingga 6,50%, capaian hingga tahun 2024 baru mencapai 86,72%. Ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam dua tahun ke depan.

Sementara itu, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 3,6 dan realisasi sebesar 4,01 dengan capaian 111,39%. Jika dibandingkan dengan terget RPD pada tahun 2026 untuk capaian IDSD telah tercapai 108,38%. Dengan adanya IDSD diharapkan akan memberikan gambaran kondisi daya saing daerah serta membantu daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangah pembangunan, selain itu juga dapat memberikan langkah/upaya perbaikan bagi daerah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan serta pemerataan pembangunan antar daerah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.20 sebagai berikut:

Tabel 3.20.

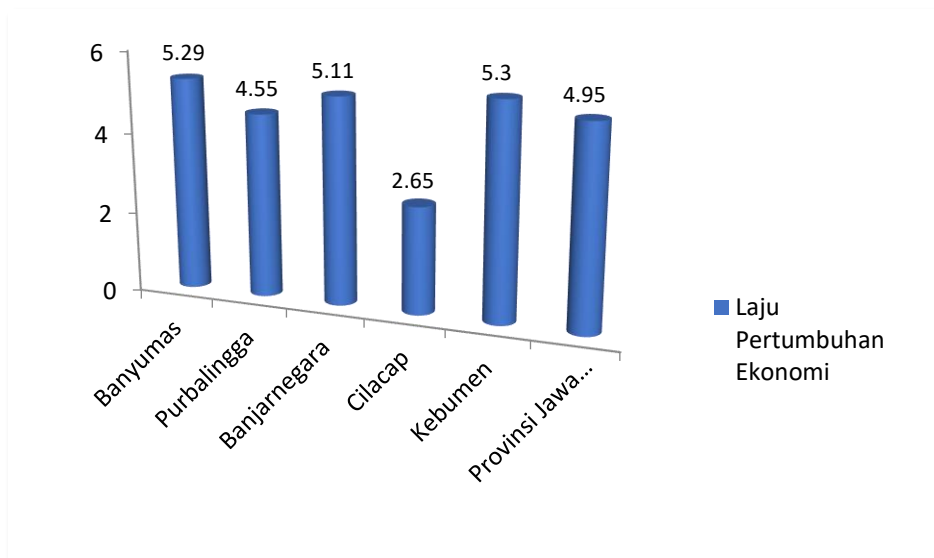
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Laju pertumbuhan ekonomi	5,29%	5,03%	4,95%	4,55%	5,11%	2,65%	5,30%
Indeks daya saing daerah (IDSD)	4,01	3,43	3,84	3,61	3,46	3,55	3,77

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Grafik 3.11

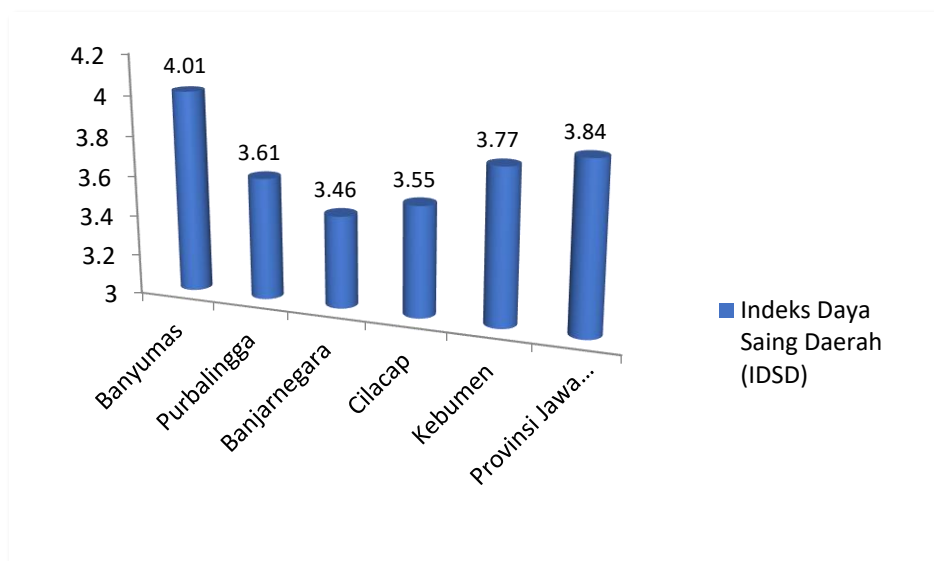
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Grafik 3.12

Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb) dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah, 2024

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mencapai 5,29%, capaian ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga (4,55%), Kabupaten Banjarnegara (5,11%), Kabupaten Cilacap (2,65%) dan Provinsi Jawa Tengah (4,95%) walaupun sedikit lebih rendah dari capaian Kabupaten Kebumen (5,30%).

Capaian IDSD Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebesar 4,01, capaian ini apabila di bandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah (3,840 dan kabupaten disekitar (Barlingmascakeb) menduduki peringkat pertama. Semakin tinggi IDSD suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya, berdasarkan hal tersebut maka ini menunjukan bahwa Kabupaten Banyumas tingkat kesejahteraan masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar.

e. Analisis Upaya Dalam Pencapaian Target Kinerja

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Kabupaten Banyumas Dalam Angka (BPS, 2024) sebagai berikut:

- 1) Kontraksi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,54% pada tahun 2024, turun dari 1,85% pada tahun 2023. Mengingat sektor ini memiliki kontribusi besar dalam perekonomian, penurunan pertumbuhannya berdampak langsung pada keseluruhan ekonomi.
- 2) Penurunan Kinerja Sektor Perdagangan
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor mengalami perlambatan dengan hanya tumbuh 4,08% pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan 5,81% pada tahun 2023.
- 3) Penurunan Sektor Transportasi dan Pergudangan
Pada tahun 2023, sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan 7,85%, namun pada tahun 2024 hanya tumbuh 5,00%.
- 4) Perlambatan di Sektor Industri Pengolahan
Sektor Industri Pengolahan tumbuh 5,05% pada tahun 2024, sedikit lebih rendah dibandingkan 5,53% pada tahun 2023.
- 5) Perubahan Tren Pertumbuhan di Beberapa Sektor Jasa
Beberapa sektor jasa mengalami perlambatan, seperti:

- a) Informasi dan Komunikasi tumbuh 8,26% pada 2024, turun dari 10,30% pada 2023.
- b) Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,87% pada 2024, turun dari 11,01% pada 2023.

Penurunan di sektor-sektor ini bisa mengindikasikan mulai stabilnya pertumbuhan setelah lonjakan tinggi di tahun-tahun sebelumnya, terutama pasca pandemi.

6) Kinerja Positif di Beberapa Sektor Tidak Mampu Menutup Penurunan di Sektor Lain

Meskipun beberapa sektor seperti Jasa Perusahaan (9,59%), Administrasi Pemerintahan (9,39%), dan Jasa Pendidikan (8,16%) mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2024, kontribusinya belum cukup untuk mengimbangi perlambatan di sektor lain yang memiliki peran lebih besar dalam struktur ekonomi.

Upaya yang telah dilaksanakan agar target kinerja laju pertumbuhan ekonomi tercapai sebagai berikut:

1) Peningkatan Investasi dan Iklim Usaha

Peningkatan investasi dan iklim usaha diupayakan dengan hal-hal berikut:

- a) Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyederhanakan proses perizinan melalui sistem digital untuk menarik lebih banyak investor. Untuk izin berusaha melalui webiste <https://oss.go.id/> dan jika izin non berusaha melalui webiste <https://perizinan.banyumaskab.go.id>.
- b) Melaksanakan Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi di Kabupaten Banyumas melalui Pameran Investasi, Business Forum, dan Business Meeting Berkolaborasi dengan BUMD, Perusahaan Swasta, Asosiasi/Komunitas dan Pemerintah
- c) Membuat Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Banyumas berupa Investment Project Ready To Offer (I-PRO) Berkolaborasi dengan Akademisi, BUMD, Perusahaan Swasta, Asosiasi dan Pemerintah
- d) Pelayanan perizinan dengan metode “jemput bola” ke Kecamatan guna meningkatkan perizinan melalui Nomor Induk Berusaha dan perizinan lainnya bagi Masyarakat.

2) Pengembangan UMKM

- a) Pelatihan Pengembangan UMKM: Menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi pelaku UMKM terkait manajemen usaha, pemasaran digital, inovasi produk, hingga keuangan.
- b) Penyaluran Dana Bergulir: Memberikan akses permodalan melalui dana bergulir yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.
- c) Pembangunan Infrastruktur Pendukung: Meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas bagi UMKM, seperti pasar rakyat, pusat distribusi, dan kawasan sentra industri kecil.
- d) Pelatihan Eksportir: Meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat menembus pasar ekspor melalui bimbingan teknis, sertifikasi, serta akses jaringan internasional.
- e) Melaksanakan pengawasan serta pendampingan Koperasi dengan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan untuk meningkatkan Koperasi Sehat dan Aktif.
- f) Melakukan MoU dengan PHRI untuk memberikan ruang pada UMKM untuk melakukan pemasaran atau promosi di hotel di bawah naungan PHRI.

3) Pengembangan Tenaga Kerja

- a) Melakukan pembinaan kepada Serikat Pekerja, Organisasi Pekerja, dan Organisasi Pengusaha untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis serta mencegah konflik antara pekerja dan penyedia kerja.
- b) Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi guna meningkatkan kapasitas serta daya saing pencari kerja.
- c) Mengadakan job fair dan mengelola informasi pasar tenaga kerja melalui platform media sosial secara rutin.
- d) Memberikan fasilitasi kepada buruh Calon Pekerja Migran Indonesia.

4) Pengembangan Sektor Pariwisata

- a) Melakukan promosi pariwisata melalui platform digital dan konvensional serta menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait.
- b) Menyusun kalender event sebagai panduan agenda wisata daerah.
- c) Meningkatkan kapasitas pelaku wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui berbagai pelatihan.

- d) Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi mereka dalam industri pariwisata.

Gambar 3.9.

Pameran Produk Unggulan, Perdagangan, Pariwisata dan Investasi di Batam



Sumber: <https://dinnakerkopukm.banyumaskab.go.id/>, 2024

Gambar 3.10.

Pelatihan Pengasuh Lansia untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)



Sumber: Dinnakerkop UKM, 2024

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efisiensi dengan menerapkan kebijakan yang mendorong inovasi, investasi, dan kompetisi.
2. Melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan investasi pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi (seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan), dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
4. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
5. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.21.
Efisiensi Anggaran Tujuan 3 Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024	Anggaran Akhir perubahan 2024)	Selisih (Rp)
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	249,354,500	305,854,500	56,500,000
2	Program Pemasaran Pariwisata	118,850,000	218,850,000	100,000,000
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	345,000,000	345,000,000	-

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024	Anggaran Akhir perubahan 2024)	Selisih (Rp)
4	Program Pengembangan Kebudayaan	3,139,003,900	4,585,411,000	1,446,407,100
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	239,745,800	242,011,800	2,266,000
6	Program Pengelolaan Permuseuman	740,000,000	826,334,000	86,334,000
7	Program Penyuluhan Pertanian	952,472,000	834,800,000	(117,672,000)
8	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	80,000,000	92,472,345	12,472,345
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7,845,847,340	10,092,247,340	2,246,400,000
10	Program Pengembangan Ekspor	205,000,000	335,000,000	130,000,000
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	230,000,000	310,000,000	80,000,000
12	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10,000,000	15,000,000	5,000,000
13	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	830,000,000	1,534,198,640	704,198,640
14	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	59,950,000	64,950,000	5,000,000
15	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5,000,000	4,600,000	(400,000)
16	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	25,975,000	14,594,100	(11,380,900)

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024	Anggaran Akhir perubahan 2024)	Selisih (Rp)
17	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32,990,000	25,962,500	(7,027,500)
18	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	27,535,000	20,390,000	(7,145,000)
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	521,784,000	681,784,000	160,000,000
20	Program Pengembangan Umkm	207,862,480	182,766,560	(25,095,920)
21	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	600,000,000	594,467,819	(5,532,181)
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	225,456,453,284	223,464,686,885	(1,991,766,399)
23	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1,821,136,400	2,216,486,400	395,350,000
24	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	68,349,900	68,349,900	-
25	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	305,000,000	315,000,000	10,000,000

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024	Anggaran Akhir perubahan 2024)	Selisih (Rp)
26	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	50,920,914,000	51,996,119,000	1,075,205,000
27	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,488,131,300	1,674,236,900	186,105,600
28	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	548,500,000	535,196,000	(13,304,000)
29	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10,459,250,000	11,223,260,500	764,010,500
30	Program Pengembangan Perumahan	392,400,000	332,930,500	(59,469,500)
31	Program Kawasan Permukiman	200,000,000	262,500,000	62,500,000
32	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4,650,000,000	9,484,631,500	4,834,631,500
33	Program Penatagunaan Tanah	150,000,000	248,552,100	98,552,100
34	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	21,936,200,000	21,918,732,400	(17,467,600)
35	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	17,341,475,000	17,185,114,899	(156,360,101)

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024	Anggaran Akhir perubahan 2024)	Selisih (Rp)
	Penyediaan Air Minum			
36	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	30,261,321,000	30,182,324,798	(78,996,202)
37	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	524,000,000	823,939,000	299,939,000
38	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3,476,993,000	4,782,803,000	1,305,810,000
39	Program Penataan Bangunan Gedung	61,237,400,000	85,951,704,329	24,714,304,329
40	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	145,200,000	129,000,000	(16,200,000)
41	Program Penyelenggaraan Jalan	40,883,598,000	80,141,601,316	39,258,003,316
42	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	150,000,000	312,200,000	162,200,000
43	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	5,351,988,344	17,117,893,708	11,765,905,364
44	Program Pengelolaan Pelayaran	1,000,000	1,000,000	-
45	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	325,000,000	250,344,894	(74,655,106)
46	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	825,000,000	4,909,606,500	4,084,606,500
47	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan	85,710,000	61,750,610	(23,959,390)

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024	Anggaran Akhir perubahan 2024)	Selisih (Rp)
	Lingkungan Hidup			
48	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	976,882,686	1,680,933,060	704,050,374
49	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	50,000,000	40,245,000	(9,755,000)
	Jumlah	500,517,772,934	592,628,473,652	92,110,700,718

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas (diolah), 2024

Dari data anggaran tahun 2024, terdapat beberapa program yang mengalami perubahan alokasi dana, baik peningkatan maupun pengurangan yang menunjukkan adanya penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Secara keseluruhan program yang mendukung tujuan 3 (tiga) tidak terjadi efisiensi.

Terdapat 21 program yang mengalami efisiensi anggaran. Program dengan pengurangan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang berkurang sebesar Rp 1.991.766.399,00. Pengurangan besar lainnya terjadi pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan penurunan sebesar Rp 156.360.101,00 serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang berkurang Rp 98.429.149,00. Pengurangan-pengurangan anggaran ini kemudian dialokasikan kembali kepada program-program prioritas.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tercapainya tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah didukung melalui program-program berikut :

Tabel 3.22.
Program Tujuan 3 Tahun 2024

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
Persentase Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang dibina	progres positif	%	75.56	79.61	105.36
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
Persentase panjang jalan sebagai jalur evakuasi dalam kondisi baik	progres positif	%	70.53	70.76	100.33
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
Persentase Peningkatan Drainase lingkungan dalam Kondisi Baik	progres positif	%	0.92	1.54	167.39
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
Persentase cakupan area layanan persampahan	progres positif	%	90.25	90.45	100.22
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota	progres positif	%	78.58	79.51	101.18
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
Persentase rata rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
Persentase Bangunan Gedung yang tertata	progres positif	%	87.21	86.047	98.67
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
Persentase luas kawasan strategis yang tertata	progres positif	%	82.98	82.979	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	progres positif	%	59.254	50.59	85.38
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRINASE					
Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	progres positif	%	78.279	79.463	101.51
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	progres positif	%	94	93.24	99.19
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani	progres positif	%	43.15	55.41	128.41
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Rasio Permukiman Layak Huni	progres positif	%	80.21	80.15	99.93
Prosentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	progres positif	%	40	40.92	102.3
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
Prosentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	progres positif	%	100	100	100
Presentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	progres positif	%	100	N/A	N/A
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
Presentase peningkatan RTLH yang diperbaiki	progres positif	%	75.48	70.71	93.68
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Cakupan patroli di wilayah	progres positif	%	100	100	100
Prosentase wilayah yang terpenuhi SDM Linmasnya	progres positif	%	100	100	100
Cakupan perlindungan masyarakat di wilayah	progres positif	%	100	107.65	107.65
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	progres positif	%	100	100	100
Prosentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan	progres positif	%	100	100	100
Prosentase penanganan korban bencana yang tertangani	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
Persentase tanah yang tertata	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
Persentase dokumen perencanaan yang disusun	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
Persentase luasan RTH publik	progres positif	%	11.1	11.35	102.25
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
Persentase sampah yang tertangani terkelola	progres positif	%	99	99.34	100.34
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
Persentase kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
Persentase Persentase MHA yang dibina terkait PPLH	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan LH	progres positif	%	85.85	92.31	107.52
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	progres positif	%	75	75	100
Persentase kendaraan yang melakukan uji laik	progres positif	%	92	76.26	82.89
Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	progres positif	%	2.29	4.099	179
prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan	progres positif	%	85.2	100	117.37
Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
prosentase wilayah yang terhubung angkutan sungai	progres positif	%	50	75	150
Persentase prasarana angkutan sungai	progres positif	%	60	66.6	111
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
Persentase koperasi yang mendapat pemberdayaan dan perlindungan	progres positif	%	22.86	2.77	12.12
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan	progres positif	%	35.71	16.89	47.3

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	progres positif	%	28.57	16.62	58.17
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
Presentase fasilitas penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	progres positif	%	0.5	1.49	298
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
Persentase peningkatan UMKM yang dikembangkan	progres positif	%	0.17	0.48	282.35
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
Presentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan	progres positif	%	28.57	16.62	58.17
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
Persentase cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Daerah	progres positif	%	42.5	48.33	113.72
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	progres positif	%	39.18	38.68	98.72
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
Persentase peningkatan budaya yang menjadi daya tarik wisata	progres positif	%	12.5	-32.98	-263.84
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
Produksi Olahan Hasil Perikanan	akumulatif	Ton	871.5	942.5	108.15
Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	progres positif	kg/kapita/tahun	2	N/A	N/A
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
Persentase Peningkatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	progres positif	%	1.67	32.9	1970.06
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
Persentase Peningkatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif	progres positif	%	22.73	150	659.92
Persentase SDM Kepariwisata yang bersertifikat	progres positif	%	32.31	5.69	17.61
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata yang dikelola Pemda	progres positif	%	2	26.21	1310.5

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
Persentase peningkatan kelas kelompok	progres positif	%	4	4.21	105.25
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
Prosentase pasar rakyat yang dipelihara dan direvitalisasi	progres positif	%	92.31	92.86	100.6
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
Nilai ekspor perdagangan pelaku usaha ekspor yang difasilitasi	akumulatif	\$ USD	60000000	93349422.5	155.58
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya UTP yang ditera tera ulang	progres positif	%	71	92.41	130.15
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	progres positif	%	1	1.13	113
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	progres positif	%	86	88.08	102.42
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
Persentase IKM yang dibina	progres positif	%	0.2	0.206	103
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI IPUI Kecil dan Menengah IUKI dan IPKI yang dikeluarkan oleh instansi terkait	progres positif	%	81.25	88	108.31
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
Persentase data informasi industri yang tersedia	progres positif	%	40	45	112.5
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Indeks Inovasi Daerah	progres positif	Nilai	62	53.56	86.39
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Persentase penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	progres positif	%	100	104.17	104.17
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
Persentase pelaksanaan pendidikan politik	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	progres positif	%	100	100	100

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d. TW IV
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas (diolah), 2024

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dengan indikator Laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks daya saing daerah (IDSD) didukung oleh 62 (enam puluh dua) program dengan indikator sejumlah 83 (delapan puluh tiga) indikator. Dari 83 (delapan puluh tiga) indikator pada 62 (enam puluh dua) program pendukung tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, indikator yang realisasinya mencapai sama dengan atau lebih dari 100% sebanyak 67 (enam puluh tujuh) indikator.

4. Tujuan 4 : Memperkuat ketahanan pangan

Dalam rangka mencapai tujuan Memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan indikator kinerja utama, yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Memperkuat ketahanan pangan daerah tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,32	80.74	100,5

Sumber : e-Monev Kab. Banyumas, 2024

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas tahun 2024 ditargetkan sebesar **80,32**, dengan realisasi mencapai **80,74**. Dengan capaian **100,5%**, Kabupaten Banyumas berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan tetap berada dalam klasifikasi **Sangat Tahan (Prioritas 6)**.

IKP merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Indeks ini digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* serta sebagai alat evaluasi kinerja daerah dalam pemenuhan urusan wajib pemerintah terkait ketahanan pangan.

Secara nasional, IKP setiap kabupaten/kota dikelompokkan dalam enam kategori, dari Sangat Rentan (Prioritas 1) hingga Sangat Tahan (Prioritas 6). Dengan capaian 80,74, Kabupaten Banyumas menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang sangat baik.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan, termasuk dalam aspek produksi, distribusi, dan akses pangan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga pangan, perubahan iklim, serta akses pangan bagi kelompok rentan.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Memperkuat ketahanan pangan tahun 2024 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.24 sebagai berikut :

Tabel 3.24.

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	74,02	79.97	108,04

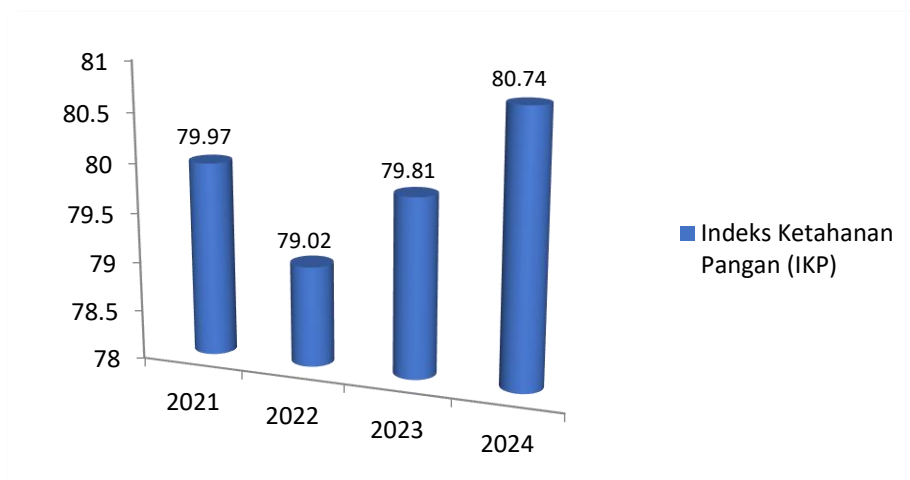


Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	74,03	79.02	106,74
Tahun 2023				
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	74,04	79.81	107,79
Tahun 2024				
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,32	80.74	100,52

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

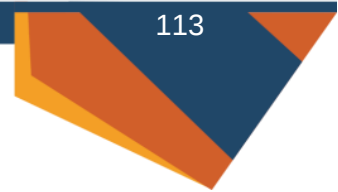
Grafik 3.13

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2021 s.d 2024



Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Realisasi dan capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari tahun 2021 hingga tahun 2023 selalu melampaui target dengan capaian di atas 106%. Tahun 2021 mencatat realisasi sebesar 79,97 dari target 74,02 (108,04%), sementara tahun 2022 dan tahun 2023 masing-masing mencapai 79,02 dan 79,81 dengan capaian 106,74% dan 107,79%. Tren ini menunjukkan stabilitas ketahanan pangan dengan berbagai faktor pendukung seperti produksi, distribusi, dan kebijakan yang efektif.



Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan target yang lebih tinggi, dari 74,04 di tahun sebelumnya menjadi 80,32, menyesuaikan capaian tahun sebelumnya yang telah mencapai 79,81. Meskipun realisasi meningkat ke 80,74, capaian lebih terkendali di angka 100,52%. Hal ini mengindikasikan pendekatan yang lebih realistis dalam penetapan target.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Memperkuat ketahanan pangan tahun 2024 dengan target akhir pada RPD ditampilkan pada tabel 3.25 sebagai berikut :

Tabel 3.25.

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2026 akhir RPD	Persentase Kinerja RPD s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,32	80,74	100,52	83,01	97,26

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dengan realisasi sebesar 80,74 dari target 80,32, atau mencapai 100,52%. Jika dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 83,01, maka hingga tahun 2024 telah tercapai 97,26% dari target tersebut.

Capaian ini mengindikasikan bahwa dalam dua tahun terakhir RPD, masih diperlukan peningkatan sekitar 2,74% untuk mencapai target akhir. Meskipun progresnya sudah mendekati target, tetap diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian yang optimal pada tahun 2026. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi



peningkatan produksi pangan, penguatan sistem distribusi, serta kebijakan ketahanan pangan yang lebih adaptif terhadap tantangan di lapangan. Dengan tren pertumbuhan yang positif, target RPD tahun 2026 berpeluang besar untuk tercapai sesuai perencanaan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.26 sebagai berikut:

Tabel 3.26.

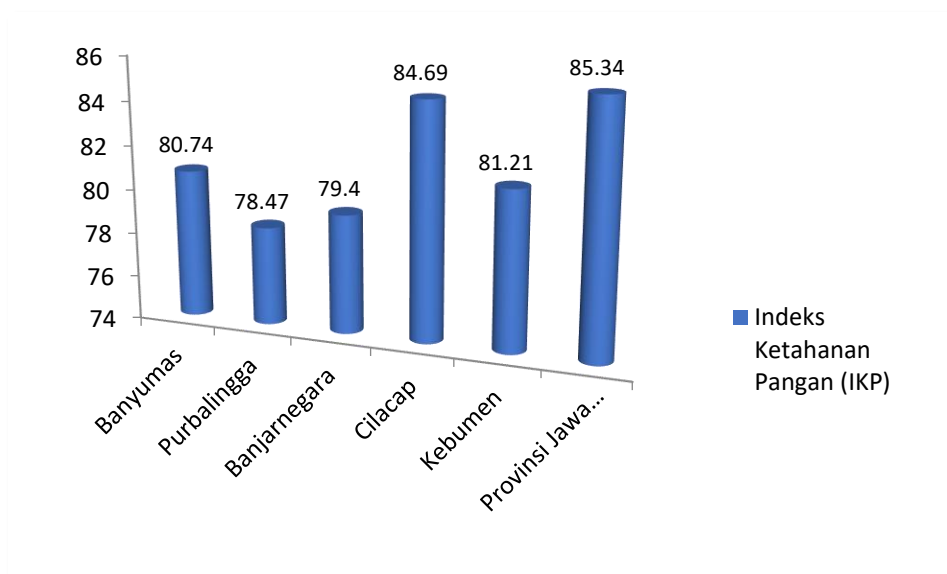
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80.74	76,20	85,34	78,47	79,40	84,69	81,21

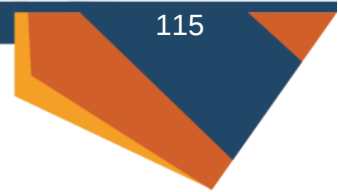
Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Grafik 3.14

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb)



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024



Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Banyumas memiliki nilai 80,74. Jika dibandingkan dengan standar nasional yang berada di angka 76,20, maka kinerja Kabupaten Banyumas berada di atas rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan di daerah ini relatif lebih baik dibandingkan standar nasional.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki nilai 85,34, maka capaian Kabupaten Banyumas masih berada di bawah rata-rata provinsi. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Kabupaten Banyumas memiliki nilai lebih tinggi dari Kabupaten Purbalingga (78,47) dan Kabupaten Banjarnegara (79,40). Namun, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap (84,69) dan Kabupaten Kebumen (81,21).

e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

1) Dukungan dan Komitmen Pimpinan Daerah

Peran aktif pimpinan daerah dalam menetapkan kebijakan strategis yang mendukung ketahanan pangan. Penyediaan anggaran dan program berkelanjutan untuk mendukung pemanfaatan pangan lokal.

2) Kolaborasi dan Sinergi Antar-Pihak

Kerja sama erat antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok wanita tani, dan masyarakat dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan.

3) Potensi Sumber Daya Alam yang Melimpah

Kabupaten Banyumas memiliki lahan pertanian dan pekarangan yang subur untuk mendukung produksi pangan lokal. Ketersediaan sumber daya alam yang beragam memungkinkan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.

4) Partisipasi Aktif Masyarakat

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengadopsi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Peran kelompok wanita tani, penggerak PKK, dan komunitas lokal dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.

- 5) Inovasi dan Kreativitas dalam Pengolahan Pangan Lokal
Peningkatan kreativitas pelaku usaha dalam mengolah pangan lokal agar lebih bernilai ekonomis dan menarik di pasar.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target adalah :

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan;
- 2) Serangan organisme pengganggu tanaman;
- 3) Kekeringan akibat kemarau Panjang.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- 1) Edukasi gizi yang lebih intensif termasuk promosi konsumsi pangan lokal yang kaya nutrisi kepada masyarakat.
- 2) Penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal diperlukan untuk mendorong pemanfaatan potensi pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, meningkatkan produktivitas tanaman pangan lokal, serta mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah.
- 3) Monitoring Rumah Pangan B2SA
Monitoring Desa Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) bertujuan untuk memastikan prinsip B2SA diterapkan dalam pengelolaan pangan di tingkat desa. Selain sebagai sarana evaluasi efektivitas program, kegiatan ini juga mengidentifikasi potensi pengembangan guna meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan bergizi di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi, serta pemberian makanan berbasis B2SA bagi anak gizi buruk, anak kurang gizi, balita stunting, ibu hamil, dan calon pengantin.
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pekarangan sebagai sumber pangan lokal. Melalui penyuluhan dan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan, masyarakat dan kelompok wanita tani didorong untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura bernilai gizi tinggi. Upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal.

- 5) Keikutsertaan dalam Lomba Kreasi Pangan Lokal Kategori Katering
Lomba ini menjadi ajang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan olahan pangan berbasis B2SA. Tujuannya adalah:
 - a) Mendorong inovasi dalam pengolahan pangan lokal
Melalui lomba kreasi dan pelatihan, pelaku usaha didorong untuk menciptakan produk pangan yang tidak hanya inovatif tetapi juga memberikan manfaat gizi optimal bagi masyarakat.
 - b) Mengenalkan dan mengoptimalkan pangan lokal
Kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberagaman pangan lokal yang bergizi, sehat, dan memiliki daya saing di pasar.
 - c) Mengembangkan kreativitas dan peluang ekonomi
Lomba dan pelatihan menjadi wadah bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menciptakan produk pangan yang kreatif, menarik, serta memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga membuka peluang pemasaran yang lebih luas dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.
- 6) Pelatihan Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari kelompok wanita tani dan penggerak PKK tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengolah sumber pangan lokal alternatif (non-beras, non-terigu), menghasilkan produk pangan yang sehat, aman, bernilai ekonomis, dan berdaya saing dan meningkatkan citra pangan lokal di masyarakat.
- 7) **Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)**
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unsur, termasuk Perangkat Daerah, guru, dan siswa SMP Negeri. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi B2SA dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi.

Gambar 3.11.

Pelatihan Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal



Sumber: Dinperten KP Kab. Banyumas,2024

Gambar 3.12.

Sosialisasi Rumah Pangan B2SA di Desa Tumiyang



Sumber: Dinperten KP Kab. Banyumas,2024

Gambar 3.13.

Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)



Sumber: Dinperten KP Kab. Banyumas, 2024

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Peningkatan efisiensi dalam usaha tani, seperti penggunaan teknologi pertanian yang tepat, pengelolaan lahan yang baik, dan pemanfaatan pupuk yang optimal, dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.
2. Efisiensi dalam rantai pasok pangan, mulai dari panen hingga distribusi ke konsumen, untuk mengurangi hilangnya bahan makanan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup.
3. Efisiensi dalam konsumsi pangan, seperti mengurangi pemborosan makanan dan memilih makanan yang bergizi, agar berkontribusi pada ketahanan pangan.
4. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
5. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang

kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

6. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
7. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.27
Efisiensi Anggaran Tujuan 4 Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2024)	Selisih (Rp)
1	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	150,000,000	235,031,050	85,031,050
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	197,500,000	181,050,000	(16,450,000)
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	45,000,000	42,740,000	(2,260,000)
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,004,800,000	1,255,863,881	251,063,881
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10,000,000	10,000,000	-
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	13,043,251,000	18,764,052,388	5,720,801,388
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	17,500,000	15,650,000	(1,850,000)
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	80,000,000	62,637,000	(17,363,000)
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	486,150,000	476,490,395	(9,659,605)

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal induk 2024 (Rp)	Anggaran Akhir perubahan 2024)	Selisih (Rp)
10	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	215,000,000	192,616,300	(22,383,700)
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,024,834,405	87,603,169,528	(2,421,664,877)
12	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9,386,212,000	10,172,801,400	786,589,400
13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,562,895,200	3,206,934,000	644,038,800
14	Program Perizinan Usaha Pertanian	10,000,000	10,000,000	-
15	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	670,000,000	675,585,000	5,585,000
	Jumlah	117,903,142,605	122,904,620,942	5,001,478,337

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas (diolah), 2024

Dari data anggaran tahun 2024, terdapat beberapa program yang mengalami perubahan alokasi dana, baik peningkatan maupun pengurangan yang menunjukkan adanya penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Secara keseluruhan program yang mendukung tujuan 4 (empat) tidak terjadi efisiensi.

Terdapat 7 program yang mengalami efisiensi anggaran. Program dengan pengurangan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang berkurang sebesar Rp 2.421.664.877,00. Pengurangan besar lainnya terjadi pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan penurunan sebesar Rp 22.383.700,00 serta Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, yang berkurang Rp 17.363.000,00. Pengurangan-pengurangan anggaran ini kemudian dialokasikan kembali kepada program-program prioritas.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tercapainya tujuan Memperkuat ketahanan pangan didukung melalui program-program berikut :

Tabel 3.28.
Program Tujuan 4 Tahun 2024

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d. TW IV
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
Persentase bangunan penampung air baku dalam kondisi baik	progres positif	%	55.56	68.18	122.71
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
Persentase pembangunan turap di wilayah aliran sungai rawan longsor	progres positif	%	55.31	53.791	97.25
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	progres positif	%	82.11	81.66	99.45
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
Angka kecukupan protein	progres positif	gram/kapita/hari	57	59	103.51
Angka kecukupan energi	progres positif	kcal/kapita/hari	2100	2079	99
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
Jumlah desa rawan pangan yang diberi bantuan	akumulatif	Desa	5	14	280
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
Peningkatan jumlah sarpras pendukung pengelolaan cadangan pangan	progres positif	%	1	N/A	N/A
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
Persentase peningkatan jumlah sampel pangan	progres positif	%	10	94.85	948.5
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
Produksi Perikanan Budidaya	akumulatif	Ton	12186	12211.64	100.21
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
Produksi Perikanan Tangkap	akumulatif	Ton	970.34	974.56	100.43
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan Umum aktif	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
Persentase penanganan bencana pertanian	progres positif	%	75	92.9	123.87
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					

Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024 s.d. Trw IV	Tingkat Capaian RKPD 2024 s.d TW IV
Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	progres positif	%	5	6.1	122
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
Persentase peningkatan populasi ternak	progres positif	%	3	-10.9	-363.33
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
Jumlah jenis infrastruktur peternakan yang disediakan	akumulatif	Jenis	2	2	100
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
Persentase penurunan angka kejadian penyakit	progres negatif	%	8	7.8	200
Persentase Peningkatan Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	progres positif	%	2	2.42	121
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
persentase peningkatan usaha peternakan yang berizin	progres positif	%	1	1.66	166
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
Produtivitas komoditas Padi	progres positif	Ton / Ha	5.88	5.9	100.34
Produktivitas komoditas Kedelai	progres positif	Ton / Ha	1.7	1.74	102.35
Produktivitas komoditas Jagung	progres positif	Ton / Ha	6.4	6.53	102.03
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
Koefisien variasi harga barang	progres negatif	%	15	7.49	172.73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	95	96.84	101.94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	progres positif	%	100	100	100

Tercapainya tujuan Memperkuat ketahanan pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) didukung oleh 15 (lima belas) program dengan indikator sejumlah 26 (dua puluh enam) indikator. Dari 26 (dua puluh enam) indikator dari 15 (lima belas) program pendukung tujuan Memperkuat

ketahanan pangan, indikator yang realisasinya mencapai 100% atau lebih dari 100% sebanyak 21 dua puluh satu) indikator.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29.

Realisasi Anggaran Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas
(Sebelum Audit BPK RI)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Pendapatan Daerah	3.933.618.417.223	3.668.907.577.306	93,27
1.1	Pendapatan Asli Daerah	947.208.870.223	903.522.400.420	95,39
1.2	Pendapatan Transfer	2.981.137.407.000	2.751.898.705.730	92,31
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.272.140.000	13.486.471.156	255,81
2.	Belanja Daerah	4.144.715.702.386	3.761.970.801.506	90,77
2.1	Belanja Operasi	3.041.774.010.933	2.771.577.221.551	91,12
2.2	Belanja Modal	494.655.850.432	412.437.100.577	83,38
2.3	Belanja Tidak Terduga	4.000.105.141	386.204.095	9,65
2.4	Belanja Transfer	604.285.735.880	577.570.275.283	95,58
3.	Pembiayaan Daerah	211.097.285.164	214.097.215.344	101,42
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	275.887.301.164	275.887.231.164	100,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	64.790.016.000	61.790.015.820	95,37
	Pembiayaan Netto	211.097.285.164	214.097.215.344	101,42
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		121.033.991.144	

Sumber : BKAD Kab. Banyumas, 2024

Tabel 3.30.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas per
Tujuan Tahun 2024

No.	Tujuan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing	974.353.384.826	917.813.803.058	94,20
2.	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	2.454.829.222.966	2.369.272.912.895	96,51
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	592.628.473.652	518.798.776.707	87,54
4.	Memperkuat ketahanan pangan	122.904.620.942	113.984.407.126	92,74
JUMLAH		4.144.715.702.386	3.919.869.899.786	

Sumber : Bagian Organisasi , 2024

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis Efisiensi Kinerja adalah analisis yang membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program/ kegiatan perangkat daerah pendukung. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian tujuan dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.31.
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Indikator Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Tujuan		Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	1	111,34	917.813.803.058	94,20

Tujuan		Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
	bersih, efektif dan berdaya saing				
2.	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	3	99,17	2.369.272.912.895	96,51
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	2	105,13	518.798.776.707	87,54
4.	Memperkuat ketahanan pangan	1	100,52	113.984.407.126	92,74
Jumlah				3.919.869.899.786	94,58

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2024

Berdasarkan tabel diatas, dari 7 (tujuh) indikator yang tercapai sebanyak 5 (lima) indikator dan 2 (dua) indikator tidak tercapai. Dari capaian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berikut ini disajikan data terkait dengan efisiensi anggaran untuk pencapaian tujuan/indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih.

Tabel 3.32.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan		Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing	1	111,34	94,20	17,14

Tujuan		Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
2.	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	3	99,17	96,51	-
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	2	105,13	87,54	17,59
4.	Memperkuat ketahanan pangan	1	100,52	92,74	7,78
Rata-rata capaian			102,80	94,58	

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2024

Berdasarkan tabel diatas dari 4 (empat) tujuan, terdapat 3 (tiga) tujuan dengan rata-rata capaian kinerja melebihi realisasi anggaran, sedangkan 1 (satu) tujuan belum efisien dalam pencapaian tujuan.

Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan melalui e-Tender, Seleksi, e-Purchasing, Penunjukan Langsung dan Non e-Tender. Pemilihan Penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 20.368 paket pekerjaan, dengan total HPS sebesar Rp. 663.142.809.688, realisasi nilai kontrak sebesar Rp. 517.554.085.774, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 145.588.723.914 atau 78,05 %.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Berikut ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024, diantaranya :

Tabel 3.33.

Daftar Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
1.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (13 kali berturut-turut)	BPK RI	Pemkab Banyumas
2.	Penghargaan Indonesia Green Awards 2024:	The La Tofi School of CSR	The La Tofi School of CSR
3.	Penghargaan Penyelenggara Pemerintahan Terbaik	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Banyumas
4.	BAZNAS Award 2024	BAZNAS Republik Indonesia	Penjabat Bupati Banyumas
5.	Penghimpunan ZIS Tertinggi di Jawa Tengah	BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	BAZNAS Kabupaten Banyumas
6.	Badan Publik Informatif (KIP Award 2024)	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Kabupaten Banyumas
7.	Anugerah Bhumandala Ariti	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Banyumas

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
8.	SAKIP Predikat "A"	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kabupaten Banyumas
9.	Pentaloka Nasional ADINKES 2024	Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)	Pemerintah Kabupaten Banyumas
10.	Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan nilai 98,11 (opini kualitas tertinggi)	Ombudsman Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Banyumas
11.	Penghargaan Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Peringkat 5 Nasional Kategori Kabupaten	Kementerian PANRB	Pemerintah Kabupaten Banyumas
12.	Anugerah Meritokrasi Tahun 2024 dengan Predikat BAIK	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Pemerintah Kabupaten Banyumas
13.	Lomba Desa Wisata Nusantara 2024 (Desa Melung Raih Juara ke-IV)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	Desa Melung
14.	Penghargaan Daerah Tertib Ukur Tahun 2024	Kementerian Perdagangan	Pemerintah Kabupaten Banyumas
15.	Penghargaan Piala Adipura	Kementerian Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten Banyumas
16.	Keterbukaan Informasi Publik kategori Informatif dengan iurutan	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Dinkominfo



No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
	ke-6 kategori Kabupaten/Kota dengan Skor 96,66.		
17.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Predikat Terbaik II Kinerja Pengawasan Terbaik.	Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Kabupaten Banyumas
18.	<i>Inspiring Economic Effort Award</i> tahun 2024 Kategori Kota Indeks Konsumen Terbaik Harapan II	Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Kabupaten Banyumas



BAB IV

PENUTUP

- A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja
- B. Progres Penyelesaian Isu-isu Strategis

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 telah disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Analisis kinerja ini mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja diketahui bahwa dari 4 (empat) tujuan yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja, terdapat 5 (lima) indikator yang tercapai targetnya, 2 (dua) indikator tidak tercapai targetnya, sehingga rata-rata **capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 adalah sebesar 102,80%**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)** menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian sebesar **4,01** dari target 3,6 atau 111,39%, mencerminkan bahwa Kabupaten Banyumas tingkat kesejahteraan masyarakatnya telah tinggi. Begitu pula dengan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang mencapai **74,52** dari target 74,5 atau 100,02%, menunjukkan keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Angka kemiskinan berhasil turun menjadi **11,95%** dari target 12% - 11% atau 100,4%.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. **Laju pertumbuhan ekonomi** yang terealisasi sebesar **5,29%** dari target 5,35% - 5,40% atau 98,87%, menunjukkan bahwa upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu diperkuat. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** tercatat sebesar **6,18%**, sedikit lebih tinggi dari target 5,61% - 6,00% dengan capaian 97,08%, menunjukkan bahwa masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk penciptaan lapangan kerja.

Optimalisasi pemanfaatan anggaran juga menjadi perhatian dalam laporan ini. Meskipun terdapat efisiensi dalam beberapa program, masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp121,03 miliar, yang mencerminkan adanya anggaran yang belum terserap secara optimal. Ke depan,

perencanaan dan pelaksanaan program harus lebih terintegrasi agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami capaian serta tantangan yang masih dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Banyumas.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi akan menjadi fokus utama guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif serta meningkatkan daya saing daerah. Upaya pemberdayaan masyarakat juga akan diperkuat melalui program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.

Pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berbasis kinerja akan terus diupayakan guna memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kebijakan.

Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP., M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI BANYUMAS

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	76,95	Formulasi: Penilaian Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Tipe perhitungan: Non komulatif Sumber data: LHE RB KemenPANRB
2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	Angka kemiskinan	12% - 11%	Formulasi: Angka Kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS dengan rumus = jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100% Tipe perhitungan: Non komulatif Sumber data: Data BPS
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,61% - 6,00%	Formulasi: Angka TPT release BPS dengan rumus= persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja Tipe perhitungan: Non Komulatif Sumber data: Data BPS
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,5	Formulasi: $IPM = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3))$ dimana : X(1) : Indeks Harapan Hidup X(2) : Indeks Pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah. X(3) : Indeks Standar Hidup Layak Tipe perhitungan: Non komulatif Sumber data: Data BPS
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.	Laju pertumbuhan ekonomi	5,35% - 5,40%	Formulasi: $(PDRB \text{ Atas Dasar Harga Berlaku Tahun } N - PDRB \text{ Atas Dasar Harga Berlaku Tahun } N-1) / PDRB \text{ Atas Dasar Harga Berlaku Tahun } N-1 \text{ dikalikan } 100\%$ Tipe perhitungan: Non komulatif Sumber data: Data BPS
		Indeks daya saing daerah (IDSD)	3,6	Formulasi: Indeks Daya Saing Daerah yang dikeluarkan oleh BRIN Tipe perhitungan: Non komulatif Sumber data: Data BRIN

4	Memperkuat ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,32	Formulasi: Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten di keluarkan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) setiap tahun. IKP dibangun oleh 3 aspek ketahanan pangan yaitu: ketersediaan, keterjangkauan dan ketersediaan pangan. Tipe perhitungan: Non komulatif Sumber data: Data BAPANAS
---	-----------------------------	-------------------------------	-------	---

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.005.000.000
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.853.879.600
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	96.243.160
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.702.057.600
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	680.000.000
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.034.805.500
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	745.000.000
9	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.975.000
10	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	225.000.000
11	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	239.745.800
12	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	8.500.000
13	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	118.850.000
14	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	20.000.000
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	305.000.000
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	8.544.300.000
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	13.500.000
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	201.000.000
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.782.524.000
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.132.698.999
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	869.668.000
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	521.784.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	215.550.000
24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	90.000.000
25	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	68.349.900
26	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	12.722.264.000
27	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	306.500.000
28	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
29	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	206.000.000
30	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	213.957.931.355
31	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.944.017.500
32	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	277.586.000
33	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	197.500.000
34	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000
35	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
36	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.152.000.000
37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	145.200.000
38	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	61.237.400.000
39	PROGRAM PENATAAN DESA	584.100.003
40	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	150.000.000
41	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	80.000.000
42	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	548.500.000
43	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	80.931.400
44	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	29.913.927.500
45	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	110.000.000
46	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.124.000.000
47	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	670.000.000
48	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	4.440.000
49	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	452.000.000
50	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	32.990.000
51	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	45.000.000
52	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000
53	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.410.000.000
54	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	264.192.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
55	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18.037.137.885
56	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	30.261.321.000
57	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.476.993.000
58	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.341.475.000
59	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	20.000.000
60	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	340.506.000
61	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	895.000.600
62	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	976.882.686
63	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	610.653.230.156
64	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.000.000
65	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.044.758.600
66	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	304.706.504.500
67	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.004.800.000
68	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.000.000
69	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	740.000.000
70	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	410.000.000
71	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	45.000.000
72	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000
73	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	5.000.000
74	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.043.251.000
75	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	17.500.000
76	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.000.000
77	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
78	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	205.000.000
79	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	215.000.000
80	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	150.000.000
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.366.281.000
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	235.000.000
83	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.000.000.000
84	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.139.003.900
85	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	392.400.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
86	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	825.000.000
87	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	162.762.500
88	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	345.000.000
89	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	207.862.480
90	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000
91	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	80.000.000
92	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	59.950.000
93	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	486.150.000
94	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	783.767.000
95	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	85.710.000
96	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.305.682.400
97	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	10.000.000
98	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	600.000.000
99	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.488.131.300
100	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	27.535.000
101	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT	249.354.500
102	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	215.000.000
103	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.392.822.000
104	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	25.000.000
105	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.459.250.000
106	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.821.136.400
107	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	35.000.000
108	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65.560.000
109	LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	50.920.914.000
110	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.650.000.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
111	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.845.847.340
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.320.193.282.720
113	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.386.212.000
114	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.562.895.200
115	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	40.883.598.000
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.351.988.344
117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	302.644.500
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	524.000.000
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.710.557.000
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	90.000.000
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	80.000.000
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	587.065.000
123	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
124	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	952.472.000
125	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.790.455.396
126	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	830.000.000
127	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	325.000.000
128	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	130.000.360
129	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	675.000.000
130	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	80.000.000
131	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	7.948.000
132	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	10.000.000
133	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.773.396.000
134	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	12.860.000
135	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	260.520.000
136	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	198.480.000
137	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	21.936.200.000
138	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.598.730.000
139	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	200.000.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
140	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
141	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	668.955.778
142	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	528.631.000
143	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	670.000.000
144	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	230.000.000
JUMLAH		3.920.027.282.862


 Pj. BUPATI BANYUMAS,
 HANUNG CAHYO SAPUTRO



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 135 TAHUN 2024**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rencana kerja perangkat daerah tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 061/423/Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS dengan rumus = jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Angka TPT release BPS dengan rumus= persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM = $1/3 (X(1) + X(2) + X(3))$ dimana : X(1) : Indeks Harapan Hidup X(2) : Indeks Pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah. X(3) : Indeks Standar Hidup Layak	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.	Laju pertumbuhan ekonomi	(PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun N - PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun N-1) / PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun N-1 dikalikan 100%	Sekretariat Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks Daya Saing Daerah yang dikeluarkan oleh BRIN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
4	Memperkuat ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten di keluarkan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) setiap tahun. IKP dibangun oleh 3 aspek ketahanan pangan yaitu: ketersediaan, keterjangkauan dan ketersediaan pangan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pi. BUPATI BANYUMAS,



 HANUNG CAHYO SAPUTRO